ENEWSLETTER
PKSPARLEMEN
KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF
Edisi Februari Ii Tahun 2021 No. 6

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PKS

Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si

PMN 20 Triliun untuk Jiwasraya Sangat lukai Rakyat!

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Mengelola Negara Jangan Caper, Baper dan Buzzer

KUTIPAN

Menjadi pemimpin sesungguhnya menerima satu paket lengkap dari publik berupa caci-maki atau puja-puji. Pujian diharapkan memotivasi untuk berkerja melayani rakyat lebih baik lagi, sedangkan kritik mengingatkan agar tidak tersesat.

Untuk mendapatkan panorama terbaik seringkali harus melalui jalan terjal dan berliku. Sesekali ada luka, lelah dan sesal. Tapi usaha itu akan terbayar dengan kepuasan dan apresiasi. Pun dalam mengelola negara, pastilah ada banyak masukan dan kritik sebagai cara menghadirkan kebijakan terbaik. Namun jika diserap dengan sikap terbaik, maka bisa jadi energi luar biasa.

Mengelola negara tidak bisa sekedar mencari perhatian (caper) agar dapat diapresiasi dan dipuji, tapi juga harus siap dikritik. Minta dikritik, tapi tidak mau terusik. Mencari perhatian namun disaat bersamaan mendesak pihak lain. Sungguh cara-cara yang jauh dari nilai demokrasi. Ibarat orang pacaran ingin menang sendiri atau egois.

Apalagi jika mengelola negara selalu membuat polemik, mencari perhatian publik dengan membuat kebijakan yang kontraproduktif. Seperti mendukung menghelat pemilu karena ingin melanggengkan family dan kerabat, namun enggan melaksanakan jika maksud dan tujuannya telah usai. Kemudian menunda UU yang sedang dibahas, padahal sudah masuk antrian. Atas nama rakyat tidak malu-malu berbalik badan dan mengatakan "kita tidak akan lanjutkan".

Padahal sebagian besar yang menunda paham akan terjadi komplikasi berbahaya dari sebuah proses yang dipaksakan tersebut; kepemimpinan yang ringkih dalam waktu yang lama, ketidakpastian hukum, dan minimnya partisipasi publik. Dicari-cari alasan dari mulai wabah, hingga musibah. Padahal dalam waktu yang sangat singkat pernah mengebut pembahasan UU yang merubah hajat hidup orang banyak, lebih dari puluhan pasal dan ayat.

Minta di kritik, tapi gampang terbawa perasaan (Baper). Mudah tersinggung dan terenyuh dengan diri sendiri, namun kaku saat terkait pihak lain yang bersebrangan. Jangankan menerima ide, kehilangannya nyawapun bagi mereka yang berbeda dianggap peristiwa biasa. Perlu lebih dari satu hari menunjukan sikap. ironisnya tidak ada sesal, prihatin apalagi belasungkawa. Karena dianggapnya semua baik- baik saja.

Menjadi pemimpin sesungguhnya menerima satu paket lengkap dari publik berupa caci-maki atau puja-puji. Pujian diharapkan memotivasi untuk berkerja melayani rakyat lebih baik lagi, sedangkan kritik mengingatkan agar tidak tersesat. Banyak pemimpin di dunia menghadapi kritik dari mulai karikatur, ungkapannya diplesetkan dan satir dirinya digambarkan. Dari mulai yang sifatnya fisik, hingga kebijakan. Namun sangat jarang ditemukan penangkapan atas dasar itu semua. Mereka menerima itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari mengambil tanggung jawab kepemimpinan. Toh pada akhirnya 'serangan kampungan' seperti itu

dianggap tidak relevan. Jika kita mudah baper dalam mempimpin negara demokrasi, sungguh akan sangat tersiksa.

Kemampuan pemangku amanat untuk meyakinkan rakyat adalah salah satu "koentji" utama dalam mendapatkan kepercayaan. Namun dalam perkembangan terkini nampak kehilangan wibawa dan gagasan. Digunakan sejumlah orang berbayar untuk mengurusi cara bicara dan berkomunikasi. Secara sadar dianggarkan miliaran rupiah menggunakan dana, fasilitas dan perlindungan. Ada anggapan "kamu boleh kritik, tapi disergap" sedangkan para Buzzer "Boleh menghina, tapi didekap".

Polarisasi yang dilembagakan, dikukuhkan dan direstui tentu tidak akan berguna menghadirkan demokrasi yang adiluhung. Hari-hari akan dilalui dengan penuh kesia-siaan dan ketidakpastian. Tentu kita tidak mau menjadi orang yang merugi karena membuang waktu dan melakukan tindakan yang tercela.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Fraksi PKS Tolak PMN untuk Jiwasraya via BPUI sebesar 20 Triliun. Lukai Rakyat!

KUTIPAN

Jakarta (08/02) --- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menolak kebijakan Penyertaan Modah Negara (PMN) bagi Indonesia Financial Group (IFG) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp20 triliun.

Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk mengembangkan skema alternatif untuk pemenuhan kewajiban bagi 5,2 juta nasabah tradisional Jiwasraya yang masih akan jatuh tempo secara bertahap dalam jangka panjang.

"Fraksi PKS menilai skema pemberian PMN untuk BPUI adalah skema *financial engineering* yang menyebabkan Rakyat dan Negara menanggung beban berat dari Skandal Jiwasraya. Skandal Jiwasraya merupakan korupsi dan kejahatan terorganisir (organized crime) yang dilakukan oleh sekelompok orang sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian besar."

disampaikan dengan tegas Anis Byarwati dihadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada hari senin (8/2) di Gedung DPR RI.

Anggota FPKS ini menambahkan pemberian PMN kepada BPUI jelas merupakan skema untuk menanggung beban Skandal Jiwasraya yang ingin dilakukan oleh Pemerintah dengan menggunakan uang rakyat atau APBN. Sangat tidak adil memberikan PMN dari uang keringat rakyat kepada perusahaan yang dirampok oleh sekelompok orang secara terstruktur. PMN seharusnya menjadi pendorong untuk memperbaiki kinerja dan daya saing BUMN sehingga berdampak besar bagi kemakmuran rakyat.

"Fraksi PKS berpendapat kebijakan PMN untuk BPUI sebesar Rp 20 triliun kurang tepat dan tidak bisa disetujui dengan mempertimbangkan beban negara dan beban rakyat saat ini." ujar Anis

Anis menyarankan untuk memberikan rasa keadilan dan prioritas penggunaan anggaran yang lebih tepat khususnya dalam membantu masyarakat yang terdampak kesehatan dan ekonomi akibat Pandemi Covid 19. Sedangkan, alokasi anggaran PMN bisa dialokasikan untuk BUMN yang tidak memiliki masalah kejahatan (fraud), korupsi dan *moral hazard*, untuk mendorong perbaikan kinerja perusahaan sehingga bisa berkembang lebih optimal, selain itu untuk membantu akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

"Fraksi PKS berpendapat Pemerintah masih memiliki sejumlah opsi untuk mengatasi masalah Jiwasraya tanpa menggunakan dana besar dari APBN dari uang rakyat. Skema penyitaan asset dan kekayaan para pelaku kejahatan terstruktur dalam Skandal Jiwasraya harus terlebih dahulu dilakukan, sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan kepada nasabah." lugas Anggota DPR asal Jakarta ini.

Terakhir, Fraksi PKS memandang skema penyelesaian Jiwasraya yang sedang dijalankan oleh Pemerintah saat ini akan menjadi beban negara yang sangat besar kedepan ditengah munculnya kasus serupa seperti kasus Asbari dan BPJS Ketenagakerjaan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

> "Fraksi PKS memandang skema penyelesaian Jiwasraya yang sedang dijalankan oleh Pemerintah saat ini akan menjadi beban negara yang sangat besar kedepan ditengah munculnya kasus serupa seperti kasus Asbari dan BPJS Ketenagakerjaan"

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kasus Jiwasraya Diselesaikan dengan PMN, Aleg PKS: Sudah Diprediksi Sejak Awal

KUTIPAN

Jakarta (08/02) --- Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, akhirnya menyuntikkan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2021 ke 9 BUMN.

Salah satunya adalah PMN untuk BPUI sebesar Rp20 Triliun, untuk menutupi kasus gagal bayar PT Jiwasraya.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Amin Ak mengatakan, pemberian PMN untuk BUMN seharusnya dilakukan dengan menghindari adanya celah terjadinya fraud (kecurangan). Meskipun ada skema penyuntikan dana bagi BUMN melalui PMN, Pemerintah harus dapat memastikan bahwa PMN yang diberikan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

"Bukannya malah dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga uang negara dikeruk untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Fraksi PKS menolak segala bentuk suntikan dana negara yang akan digunakan untuk melanggengkan terjadinya fraud," tegas Amin.

Persoalan Jiwasraya adalah cerminan bobroknya pengelolaan sebagian BUMN akibat tidak diterapkannya prinsip-prinsip good corporate governance (GCG), termasuk di dalamnya praktik moral hazard atau fraud. Harusnya benahi BUMN secara komprehensif dan tidak segan memburu para pelaku skandal.

"Kenapa rakyat yang harus menanggung akibatnya dengan menggunakan dana negara untuk menambal likuiditasnya," tanya Amin.

Amin Ak menambahkan, dari sembilan BUMN yang akan mendapat PMN 2021 ini, Fraksi PKS menyoroti PMN untuk BPUI yang akan digunakan untuk menutupi kebobrokan pada kasus korupsi Jiwasraya. PMN ini berkedok penataan industri asuransi dan penjaminan lewat BPUI yang secara resmi mengambil alih portofolio bisnis asuransi Jiwasraya karena adanya kasus gagal bayar.

"Sejak awal adanya kasus gagal bayar pada Jiwasraya, Fraksi PKS sudah memprediksi PMN akan dikucurkan untuk Jiwasraya. Oleh karena itu kami mendorong dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) kasus Jiwasraya, agar kasus ini dibuka secara terang benderang, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif," tambah Amin Ak.

Selain menyayangkan sikap yang diambil pemerintah terhadap kasus fraud tersebut, Fraksi PKS tetap mendorong skema penyelamatan 5,2 juta nasabah Jiwasraya yang terdampak akibat kasus gagal bayar ini.

"Tidak serta merta semuanya diselesaikan dengan PMN, namun dipisahkan skema kebijakannya, agar tidak menciderai rasa keadilan bagi masyarakat," tutup Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV (Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang) itu.

AMIN AK,M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

"Sejak awal adanya kasus gagal bayar pada Jiwasraya, Fraksi PKS sudah memprediksi PMN akan dikucurkan untuk Jiwasraya. Oleh karena itu kami mendorong dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) kasus Jiwasraya, agar kasus ini dibuka secara terang benderang, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif

Fraksi PKS menolak PMN Rp 20 triliun kepada Jiwasraya melalui holding IFG BPUI dengan sejumlah alasan

PKS

a Kejahatan terorganisir (organized crime)

- Manipulasi laporan keuangan (financial engineering) untuk mengaburkan pengawasan dan memoles kinerja perusahaan.
- Penyimpangan pengelolaan saving plan dan investasi, yang mengarah pada fraud

b Persoalan Kronis dan Menahun Kasus Jiwasraya tidak terjadi dalam waktu singkat.

- BPK menjelaskan Jiwasraya mengalami masalah keuangan yang semakin berat tahun 2016 dan semakin memuncak tahun 2019 sampai dengan sekarang.

c PMN menjadi skema bail-in yang merugikan pembayar pajak

- Pemerintah terkesan menempuh jalan pintas untuk menyelesaikan Jiwasraya melalui PMN ke BPUI.
- PMN akan terus menjadi penyumbat kerugian bukan hanya karena kerugian operasional tetapi juga karena mismanagement.
- Pemberian PMN ke BPUI untuk mendirikan IFG saat krisis covid-19 tidak tepat. Fokus negara saat ini adalah penanganan covid-19 dan memerlukan dana lebih besar
- PMN untuk BPUI bersumber dari keuangan negara yang tertekan

d Tidak memenuhi Aspek keadilan

- Aspek lain yang menjadi pertimbangan terhadap keputusan penyelesaian kasus Jiwasraya adalah keadilan. Paling dirugikan kelompok nasabah tradisional seperti pensiunan hingga pegawai Jiwasraya mencapai 5,2 juta atau sekitar 95 persen dari total nasabah Jiwasraya.

Ketua FPKS: Revisi UU Pemilu Penting Untuk Perbaikan Kualitas Demokrasi

KUTIPAN

Jakarta (07/02) --- Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai revisi UU Pemilu harus terus jalan karena kebutuhan kita untuk memperbaiki kualitas demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu

"Kami melihat ada kebutuhan dan kepentingan revisi UU Pemilu yaitu untuk perbaikan kualitas demokrasi hasil evaluasi kita atas penyelenggaraan pemilu lalu," ungkap Jazuli.

Jazuli mengatakan sejatinya semua Fraksi di Komisi II sudah setuju dan saat ini sudah ada di Baleg drafnya untuk harmonisasi dan sin kronisasi. Jadi semua Fraksi melihat urgensi revisi tersebut.

"Sejumlah isu strategis antara lain ambang batas parlemen, ambang batas presiden, alokasi kursi, keserentakan pemilu, hingga perbaikan rekapitulasi yang lebih baik. Tak kalah penting desain pemilu yang mencegah keterbelahan seperti pengalaman pemilu 2019," terangnya.

Jadi menurut Anggota Komisi I ini urgensi revisi UU Pemilu jelas. Fraksi PKS sendiri prinsipnya ingin agar syarat pencalonan presiden lebih ringan sehingga lebih banyak alternatif capres yang muncul dan itu jelas baik bagi rakyat dan mencegah polarisasi atau keterbelahan seperti pemilu 2019.

Fraksi PKS juga ingin agar pilkada serentak dinormalisasi pada 2022/2023 agar kepemimpinan daerah di masa pandemi oleh pejabat defenitif. Lagipula jika digelar pada 2024 beban dan ongkos ekonomi, sosial, dan politik menjadi sangat berat berat.

Waktu pilpres dan pileg jadi satu saja sudah sangat berat bagi penyelenggara hingga menimbulkan banyak korban jiwa, apalagi ini akan ditambah dengan pilkada serentak," tekannya.

Dengan seluruh urgensi tersebut, menurut Jazuli, tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan revisi UU Pemilu.

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Kami melihat ada kebutuhan dan kepentingan revisi UU Pemilu yaitu untuk perbaikan kualitas demokrasi hasil evaluasi kita atas penyelenggaraan pemilu lalu, sejatinya semua Fraksi di Komisi II sudah setuju dan saat ini sudah ada di Baleg drafnya untuk harmonisasi dan sin kronisasi. Jadi semua Fraksi melihat urgensi revisi tersebut.

Legislator FPKS Dapil Aceh: Pilkada tahun 2022 di Serambi Mekkah, Harus Dilaksanakan!

KUTIPAN

pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 menjadi kegembiraan bagi rakyat Aceh, oleh sebab itu kekhususan Aceh jangan lagi kita gerus. Karena kerinduan rakyat Aceh mewujudkan kemandirian Aceh dalam martabat tinggi pemerintah Indonesia

Jakarta (10/02) --- Anggota Legislatif PKS Dapil 1 Aceh, Rafli, menyuarakan Pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 harus dilaksanakan.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Anggota DPR RI yang berlangsung Rabu (10/02) di Senayan Jakarta.

Menurut Rafli, pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 menjadi kegembiraan bagi rakyat Aceh, oleh sebab itu kekhususan Aceh jangan lagi kita gerus.

"Karena kerinduan rakyat Aceh mewujudkan kemandirian Aceh dalam martabat tinggi pemerintah Indonesia" Ujar Rafli saat interupsi rapat paripurna.

Anggota Komisi VI DPR RI itu juga juga mengingatkan RUU pemilu yang sedang bergulir di Senayan agar tidak mendiskreditkan UU Aceh yang sudah duluan ada.

Rafli juga berharap, semua pihak tetap berkomitmen, agar Pilkada Aceh mengacu sesuai UU Pemerintah Aceh.

"Undang - undang baru tidak boleh mendiskreditkan undang-undang yang sudah ada. Ini kontitusi" tegasnya.

"Aspirasi rakyat Aceh. Pilkada Aceh 2022 adalah keharusan yang wajib dilaksanakan. Soal pilkada Aceh kita sudah berkomitmen sesuai UU Pemerintahan Aceh." tutup Rafli.

Diberitakan media massa, banyak pihak di Aceh menolak putusan Kemendagri soal pilkada serentak 2024 diberlakukan di Aceh, bahkan DPRA sudah menyurati Kemendagri namun belum mendapat jawaban.

Sebelumnya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri merealese Pilkada serentak 2024 berlaku di suluruh wilayah NKRI termasuk juga Provinsi Aceh.

DPR RI kini tengah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Revisi tersebut belum rampung karena masih ada fraksi yang menolak beberapa isu dalam pembahasan RUU Pemilu.

RAFLI
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil NAD I

Semua pihak tetap berkomitmen, agar Pilkada Aceh mengacu sesuai UU Pemerintah Aceh. Undang - undang baru tidak boleh mendiskreditkan undang-undang yang sudah ada. Ini kontitusi. Aspirasi rakyat Aceh. Pilkada Aceh 2022 adalah keharusan yang wajib dilaksanakan. Soal pilkada Aceh kita sudah berkomitmen sesuai UU Pemerintahan Aceh

Lawan Hoaks dengan Idealisme Pers, Anggota FPKS: Selamat HPN 2021

KUTIPAN

Berita benar dan terpercaya pun kini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi Anggota DPR RI daerah pemilihan Sumbar II dari PKS Hj Nevi Zuairina masih percaya kelada pemberitaan wartawan dan media pers. Dan masih optimis pers tidak akan menjadi hoaks sebagai sumber berita nasional

Padang (09/02) --- Momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap 9 Februari, ternyata masih terpapar masifnya hoaks.

Anggota DPR RI Fraksi PKS bekerjasama dengan rekan-rekan jurnalis di dapilnya sumbar, untuk bekerja keras melawan besarnya gelombang hoaks ini.

"Bahkan saat Indonesia berkeringat basah keluar dari pandemi covid-19, justru hoaks semakin menjadi-jadi berseliweran di berbagai lini media sosial, berbagai platform," ungkap Nevi.

Berita benar dan terpercaya pun kini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi Anggota DPR RI daerah pemilihan Sumbar II dari PKS Hj Nevi Zuairina masih percaya kelada pemberitaan wartawan dan media pers. Dan masih optimis pers tidak akan menjadi hoaks sebagai sumber berita nasional.

"Ibu masih percaya bahwa pers Nasional adalah kaum idealis yang tidak akan pernah menggadaikan profesionismenya. Jurnalis tidak akan mau menceburkan diri dari lunangan lumpur hoaks itu," ujar Nevi Zuairina.

"Selamat HPN 2022, Jadilah pers profesional lawan hoaks," ujar Istri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ini.

Apalagi saat ini pandemi covid-19 masih menungkup negeri ini.

"Pers tentu punya andil besar menjadi pencerah dan penebar informasi benar dan akurat untuk menumbuhkan optimis masyarakat, bahwa kita semua bisa memutus mata rantai covid-19 dan keluar dari bencana non alam, pandemi covid-19 ini," ujar Nevi.

Terakhir Nevi Zuairina berharap insan oers tanah air khsusnya Sumbar untuk tetap bekerja menyebarkan berita berimbang tanpa melepas jubah profesionalnya.

"Pers tetaplah menjadi pilar ke empat demokrasi dan pers bekerja tetap mematuhi protokol kesehatan, salam Sukses HPN 2021," tutup Nevi Zuairina.

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

"Pers tentu punya andil besar menjadi pencerah dan penebar informasi benar dan akurat untuk menumbuhkan optimis masyarakat, bahwa kita semua bisa memutus mata rantai covid-19 dan keluar dari bencana non alam, pandemi covid-19 ini"

Hari Pers Nasional 2021, Aleg PKS: Pers Sebagai Sarana Pertahankan Ideologi Bangsa

KUTIPAN

Jakarta (09/02) --- Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mengakui bahwa peran pers saat ini sangat strategis dalam mempertahankan ideologi bangsa ini.

Selama pers memegang teguh kode etiknya, maka selama itu pers turut serta dalam memandu tegak lurusnya bangsa ini berjalan hingga masa yang akan datang.

Akmal mengucapkan selamat hari pers Nasional 2021 yang tepat pada hari ini, 9 Februari 2021, diperingati setiap tahunnya di negejri ini. Fungsi pers ini begitu besar, ibarat sebuah mata pisau, dapat digunakan apa saja baik untuk yang baik maupun untuk yang jahat.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman jurnalis dan seluruh intrumen media yang ada saat ini yang telah turut serta menjadi bagian dalam mendidik serta memperkuat cara berpikir masyarakat Indonesia mulai dari rakyat terkecil hingga pimpinan tertinggi negara. Pers ini menjadi jendela dunia untuk mengetahui berbagai hal yang terjadi saat ini, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya hingga pertahanan keamanan", ucap Akmal.

Politisi PKS ini juga menghargai pers menjadi benteng pertahanan utama dalam menghalau Hoax.

"Sejak sosial media marak mengalahkan kecepatan media mainstream, tapi sosial media memiliki kelemahan menjadi media yang campur aduk sehingga mudah sekali disusupi Hoax," ungkapnya.

Akmal meminta kepada teman-teman insan pers untuk mempertahankan ideologinya, menjunjung tinggi kode etiknya, sehingga bangsa ini dapat terselamatkan dari buruknya prilaku akibat Hoax.

"Pers tidak akan mati. Pers akan hidup sepanjang masa dengan berbagai trasnformasinya. Karena Pers adalah sebuah kekuatan. Kekuatan untuk meluruskan yang bengkok, mencerdaskan yang lemah, dan Memperkuat pemikiran masyarakat yang ada di negeri ini", seru Akmal.

Legislator asal Sulawesi selatan ini sangat yakin bahwa pers hingga masa yang akan datang tetap akan memberikan kontribusi memajukan bangsa Indonesia. Karena instrumen pers ini sangat merata mulai dari Nasional hingga daerah. Apalagi saat ini dalam dunia digital dan sosial media yang dipadukan, akan menghilangkan batas-batas wilayah bahkan negara. Rakyat Indonesia yang tersebar di seluruh dunia dapat dengan mudah mengakses informasi seputar negaranya meski ia berada di negeri orang asing.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pers baik di lingkup nasional maupun daerah terutama sulawesi selatan. Kerjasama yang baik selama ini mesti kita teruskan untuk saling bertukar gagasan, informasi dan menyebarkan kebaikan demi bangsa Indonesia yang maju dan berdaulat", tutup Andi Akmal Pasluddin.

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

> “Pers tidak akan mati. Pers akan hidup sepanjang masa dengan berbagai trasnformasinya. Karena Pers adalah sebuah kekuatan. Kekuatan untuk meluruskan yang bengkok, mencerdaskan yang lemah, dan Memperkuat pemikiran masyarakat yang ada di negeri ini”

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI: Selamat Hari Pers Nasional Indonesia Bebas Pandemi, Ekonomi Bangkit!

KUTIPAN

Jakarta (09/02) --- Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari mendukung penuh tema besar HPN 2021 'Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi.

Pers sebagai Akselerator Perubahan' yang sekaligus menjadi doa dan harapan di peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dan milad Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-75 di tengah pandemi Covid-19.

"Tema ini jadi doa dan harapan kita bersama semua Insan Indonesia wabil khusus Pers Tanah Air, Parlemen, Rakyat dan pemerintah agar kita bangkit serta berakselerasi dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 melalui pemberitaan yang menggugah semangat di tengah masyarakat sehingga terwujudnya Indonesia bebas pandemi dan Ekonomi pulih kembali," jelas Kharis dalam keterangan tertulis kepada media, Selasa (09/02).

Kharis yang merupakan Anggota DPR asal Fraksi PKS memambahkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, 53 persen lebih mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh Generasi Z (lahir pada tahun 1997-2012) dan Generasi Milenial (lahir pada tahun 1981-1996). Hal ini menjadi tantangan Pers tersendiri mengedukasi generasi penerus negeri ini.

"Lihat data sensus jelas ini potensi kita 53 persen lebih usia produktif dari 270 juta jiwa lebih, ini pasar buat Media sekaligus tantangan Pers kedepan dimana semakin meningkatnya kemampuan generasi Z dan Milenial dalam memilah dan memilih sumber informasi dan alat untuk mengaksesnya yang media harus menyesuaikan diri atau ditinggal pemirsanya" jelas Kharis.

PR besar selanjutnya adalah mencerdaskan rakyat dengan upaya pers menjadi penangkal informasi hoaks yang marak terjadi di sosial media salah satunya mengenai Covid-19. Karena itu anggota DPR asal Solo ini menekankan, pers menjadi sumber arus utama informasi sehingga masyarakat teredukasi mendapatkan informasi yang jernih yang dapat menciptakan situasi kondusif di tengah masyarakat.

"Dengan kejernihan informasi yang baik kepada masyarakat akan muncul optimisme agar kita bisa melewati masa sulit ini bersama, pandemi bukan untuk dibenci tapi jadi kunci kita lebih baik lagi, kita jauh lebih sadar kebersihan dan kesehatan dan semoga kita bisa bangkit bersama membangun ekonomi agar bangkit kembali.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI
Wakil Ketua Komisi I DPR RI

"Tema ini jadi doa dan harapan kita bersama semua Insan Indonesia wabil khusus Pers Tanah Air, Parlemen, Rakyat dan pemerintah agar kita bangkit serta berakselerasi dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 melalui pemberitaan yang menggugah semangat di tengah masyarakat sehingga terwujudnya Indonesia bebas pandemi dan Ekonomi pulih kembali."

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

*Gambar diambil sebelum Pandemi Covid-19

SELAMAT
HARI PERS
NASIONAL

09 Februari 2021

Pers yang Sehat
Pilar Kokohnya Demokrasi

Aleg PKS Kritik Kebijakan Uni Eropa Terkait Pembatasan Ekspor Vaksin Covid-19

KUTIPAN

Tasikmalaya (04/02) --- Kebijakan Pembatasan ekspor vaksin Covid-19, resmi disampaikan oleh Uni Eropa (UE) pada akhir Januari lalu.Dengan alasan pemenuhan kebutuhan dalam negeri UE yang masih kekurangan vaksin, perusahaan vaksin harus meminta izin ekspor vaksin di luar Uni Eropa.

Menanggapi hal ini Anggota Komisi I DPR RI dari PKS mengkritik langkah UE yang membatasi jumlah ekspor vaksin. Menurut Toriq Hidayat kebijakan ini dapat menghambat pemerataan pasokan vaksin keseluruh negara, imbasnya pertumbuhan ekonomi dunia semakin terpuruk.

"Banyak pelaku ekonomi memiliki operasi global yang bergantung pada rantai pasokan global. Jika virus Covid-19 tidak dapat dikendalikan dengan pemerataan vaksin, maka operasi dan rantai pasokan tersebut akan terus terganggu dan pemulihan ekonomi akan tertunda", ungkapnya.

Menurut Toriq, kebijakan UE tersebut merupakan potensi bentuk ancaman nasionalisme vaksin Dan proteksionisme vaksin. Pada pertengahan tahun lalu WHO telah memperingatkan potensi ancaman ini kepada negara-negara yang memiliki fasilitas membuat vaksin.

"Negara-negara yang memiliki fasilitas membuat vaksin Covid-19 memiliki kewajiban membantu negara-negara yang tidak memiliki kemampuan, khususnya negara-negara berkembang dan miskin, dalam memasok vaksin. Bukannya malah melakukan nasionalis dan proteksi vaksin " ungkapnya.

oriq menambahkan WHO telah berupaya mengatasi ancaman ini dengan melakukan kolaborasi bersama GAVI dan Koalisi Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI) membuat program bersama untuk mendukung akses penanggulangan COVID-19 yang disebut Fasilitas Covax.

"Covax nantinya akan memastikan distribusi yang adil dari vaksin Covid-19 dan membuatnya tersedia untuk negara-negara miskin dan berpenghasilan menengah yang tidak memiliki kemampuan untuk menandatangani perjanjian bilateral untuk pra-pembelian vaksin", jelasnya.

171 negara berpartisipasi, termasuk Indonesia yang masuk kategori Advanced Market Commitment (AMC) pada COVAX Facility. Dengan masuknya Indonesia pada COVAX Facility, maka Indonesia mendapatkan jaminan akses terhadap vaksin COVID-19 yang terjangkau dan berkualitas.

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

Banyak pelaku ekonomi memiliki operasi global yang bergantung pada rantai pasokan global. Jika virus Covid-19 tidak dapat dikendalikan dengan pemerataan vaksin, maka operasi dan rantai pasokan tersebut akan terus terganggu dan pemulihan ekonomi akan tertunda"

RUU PDP dihentikan, Aleg PKS: Hanya Sementara, Namun Akan Tetap Berlanjut!

KUTIPAN

"Agenda-agenda yang paling pokok adalah kita bersilaturahim mulai dari bertemu tokoh, bertemu kelompok-kelompok masyarakat, Insya Allah juga bertemu tokoh-tokoh humas. Kita juga rencana akan berkunjung ke mitra kerja kita di daerah seperti TNI AU. Insya Allah kita akan agendakan itu semua meski dalam waktu yang terbatas."

Jakarta (10/02) — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta menyampaikan perkembangan terkini mengenai RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

"Kita membahas RUU Perlindungan Data Pribadi, namun ternyata kemarin di proleknas masih ada dinamika dan baru disahkan belakangan. Selama proses menunggu pengesahan itu, RUU yang sedang berjalan di stop sementara. Oleh karena itu, pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi ini sementara dihentikan dulu dan akan dilanjutkan di masa sidang yang akan datang." Jelas Sukamta dalam PKS Legislative Report edisi Paripurna.

Sukamta juga menegaskan bahwa meskipun masa persidangan yang telah dilaksanakan sejak 9 Januari lalu cenderung singkat, namun Komisi I telah berkoordinasi dengan hampir semua mitra kerja Komisi.

Sukamta juga mengatakan bahwa dalam masa yang singkat tersebut agenda lebih difokuskan pada evaluasi pelaksanaan APBN 2020 dan pelaksanaan APBN 2021.

Untuk menyambut masa reses, Sukamta akan mengunjungi daerah pemilihannya dan berkoordinasi dengan masyarakat di daerah.

"Agenda-agenda yang paling pokok adalah kita bersilaturahim mulai dari bertemu tokoh, bertemu kelompok-kelompok masyarakat, Insya Allah juga bertemu tokoh-tokoh humas. Kita juga rencana akan berkunjung ke mitra kerja kita di daerah seperti TNI AU. Insya Allah kita akan agendakan itu semua meski dalam waktu yang terbatas." Jelas Sukamta.

Sebelumnya, Sukamta dan beberapa Anggota Komisi Fraksi PKS DPR RI menghadiri penutupan masa persidangan III periode 2020-2021.

Adapun pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi diajukan untuk mencegah terjadinya kebocoran data pribadi dalam layanan publik, seperti media sosial WhatsApp dan Facebook.

H. SUKAMTA, Ph.D
Anggota Komisi I DPR RI

"Kita membahas RUU Perlindungan Data Pribadi, namun ternyata kemarin di proleknas masih ada dinamika dan baru disahkan belakangan. Selama proses menunggu pengesahan itu, RUU yang sedang berjalan di stop sementara. Oleh karena itu, pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi ini sementara dihentikan dulu dan akan dilanjutkan di masa sidang yang akan datang

PKS Minta Kasus Mafia Tanah Ditangani seperti Korupsi: Extraordinary Crime

KUTIPAN

Jakarta (10/02) --- Ibunda mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menjadi korban mafia tanah.

Anggota Komisi II Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, meminta kasus tersebut dan kasus serupa lainnya diusut tuntas.

"Pertama, ini mesti dibongkar dan dianggap serius. Banyak kasus serupa dengan korban yang tidak bisa berteriak seperti Pak Dino Patti Djalal," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).

Dia meminta aparat kepolisian beserta Kementerian ATR/BPN mengusutnya sampai tuntas. Menurutnya, banyak sekali kasus pencaplokan mafia tanah.

"Aparat beserta BPN mesti menyelesaikan masalah ini hingga ke akarnya buat transparan dan akuntabel. Kami pernah kunjungan ke Kantor Wilayah Pertanahan Bali dan kasus pencaplokan tanah Universitas Udayana dilakukan oleh mafia tiap tahun," ujar Mardani.

Mardani mengatakan sudah ada tim kerja untuk mengusut mafia tanah. Sayang, menurutnya, para mafia tanah ini jauh lebih canggih. Untuk itu, dia meminta penanganan kasus mafia tanah ini harus disama-kan seperti kasus korupsi.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal di akun Twitter resminya menyebut rumah ibundanya 'dijarah' mafia sertifikat tanah, dalam artian sekelompok mafia tanah ini melakukan penipuan yang membuat sertifikat rumah ibunya tiba-tiba berpindah tangan. Dino Patti Djalal telah melaporkan kasus ini kepada kepolisian.

Itu sudah satu rumah (pertama) jadi korban, kemudian ada satu rumah lagi di daerah Pondok Indah dan juga tahu-tahu sertifikatnya sudah balik nama aja dan balik namanya sudah dua atau tiga kali, ibu saya sama sekali tidak tahu apa-apa," ujar Dino saat dihubungi, Selasa (9/2).

Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah pelaku sudah ditangkap, termasuk aktornya, Arnold Siahaya. Ada tiga orang yang ditangkap.

"Pelaku mafia sertifikat tanah yang baru-baru ini merugikan ibunda Dino Patti Djalal, pelaku atas nama Arnold Siahaya, Dedi Rusmanto, Ferry, dan kawan-kawan saat ini sudah menjalani putusan pidana terkait mafia properti yang diungkap oleh Subdit Harda pada 2019," ujar Kasubdit Harta Benda AKBP Dwiasi Wiyatputera dalam keterangannya, Rabu (10/2/2021).

Ketiga pelaku sudah ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan Lapas Cipinang. Kasus tersebut terungkap pada Januari 2021.

"Sudah ada tim kerjanya. Tapi mafia tanahnya jauh lebih canggih. Mesti ada terobosan dan seperti kasus korupsi dijadikan extraordinary crime," ujarnya.

Dr. H. MARDANI, M.Eng
Anggota Komisi II DPR RI

"Aparat beserta BPN mesti menyelesaikan masalah ini hingga ke akarnya buat transparan dan akuntabel. Kami pernah kunjungan ke Kantor Wilayah Pertanahan Bali dan kasus pencaplokan tanah Universitas Udayana dilakukan oleh mafia tiap tahun"

Ditjen Dukcapil Dituntut Tanggung Jawab Soal Dwi Kewarganegaraan Bupati Raijua Sabu

KUTIPAN

Identitas ganda yang dimiliki Bupati Raijua Sabu, Nusa Tenggara Timur (NTT) Orient Patriot Riwu Kore menuai polemik di kalangan masyarakat.

Pasalnya, Orient belum mencabut status kewarganegaraan Amerika Serikat miliknya saat mencalonkan diri menjadi bupati.

Di mata anggota Komisi II DPR Muhammad Nasir Djamil, kasus ini ada kaitannya dengan sistem administrasi kependudukan Indonesia yang lemah.

"Begitu mudahnya orang mendapatkan identitas. Karena itu, Kemendagri, dalam hal ini Ditjen Dukcapil, harus bertanggung jawab terkait dengan identitas yang dimiliki oleh yang bersangkutan," tegas Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/2).

Legislator PKS asal Aceh ini mempertanyakan sikap Kemendagri yang mempersilakan Oriend memiliki identitas ganda dan mencalonkan diri sebagai bupati.

"Bagaimana mungkin dia masih WN AS lalu masih memiliki identitas Indonesia? Kan Indonesia tidak mengenal dwi kewarganegaraan," katanya.

Pihaknya meminta agar kasus Bupati Raijua Sabu NTT menjadi perhatian serius dan patut didalami oleh Kemendagri terkait adanya unsur kesengajaan dan kebohongan publik.

"Menurut saya, ini patut didalami, apakah ada unsur kesengajaan yang menimbulkan pidana, atau seperti apa. Kemendagri harus punya keberanian untuk mendiskualifikasi," tandasnya.

H.M. NASIR DJAMIL, M.Si
Dapil Nangroe Aceh Darussalam II

"Kasus ini ada kaitannya dengan sistem administrasi kependudukan Indonesia yang lemah. Begitu mudahnya orang mendapatkan identitas. Karena itu, Kemendagri, dalam hal ini Ditjen Dukcapil, harus bertanggung jawab terkait dengan identitas yang dimiliki oleh yang bersangkutan,"

Aleg PKS Dorong Kemendagri Investigasi Kewarganegaraan Ganda Bupati Terpilih Sabu Raijua

KUTIPAN

Jakarta (08/02) --- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat, merasa miris dan heran terkait kasus bupati terpilih Sabu Raijua, Orient Riwukore yang memiliki paspor Indonesia dan E-KTP serta paspor Amerika Serikat disaat bersamaan.

Sebenarnya, kata Surahman, kasus ini bukanlah yang pertama terjadi, kita masih ingat masalah Archandra Tahar yang memiliki hal yang serupa. Oleh karenanya, Surahman Hidayat menyoroti terkait dengan sistem kependudukan.

"Komisi II dan Kemendagri perlu melakukan pendalaman atas masalah ini, apakah masalah ini dikarenakan sistem kependudukan kita yang masih lemah sehingga tidak bisa mendeteksi double kewarganegaraan, atau ada permainan oknum yang sengaja menyembunyikan hal ini. Saya khawatir kasus ini senantiasa berulang kalau tidak dibenahi akar permasalahannya," tegas Surahman.

Legislator Fraksi PKS dari Dapil Jabar X ini menilai, masalah tersebut tidak bisa dipandang ringan, karena calon kepala daerah ditegaskan dalam Undang-Undang harus Warga Negara Indonesia, dan negara kita tidak mengenal status dwiwarganegara.

"Kondisi ini sangat rentan gugatan dan mempengaruhi legitimasi bupati terpilih tentunya. Tapi saya ingin lebih menyoroti akar permasalahan kasus ini. Untuk status bupati terpilih kita serahkan kepada KPU dan Kemendagri, karena kontestasi pilkada sudah selesai dan kita membutuhkan pemerintah daerah segera bekerja menghadapi dampak covid 19 yang belum kunjung mereda, tapi tentunya pendekatan hukum harus dikedepankan dibandingkan pendekatan politis untuk memutuskan pencalonan bupati Orient Riwukore sah atau tidak," ujar Surahman.

Surahman Hidayat berharap masalah seperti ini tidak terulang kembali, oleh sebab itu komisi II perlu mendorong Kemendagri bekerja sama dengan Kemenkumham segera melakukan investigasi terkait dengan sistem kependudukan yang berjalan saat ini, sehingga kasus double kewarganegaraan tidak kembali terjadi, dan masalah kependudukan lainnya seperti masalah double E-KTP atau E-KTP aspal (asli dengan identitas palsu) bisa teratasi.

"Terkait hal ini kita tidak perlu mencari kesalahan, tapi kita mencari apa yang masih lemah untuk segera dibenahi," pungkas Surahman.

Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.
Anggota Komisi II DPR RI

"Komisi II dan Kemendagri perlu melakukan pendalaman atas masalah ini, apakah masalah ini dikarenakan sistem kependudukan kita yang masih lemah sehingga tidak bisa mendeteksi double kewarganegaraan, atau ada permainan oknum yang sengaja menyembunyikan hal ini. Saya khawatir kasus ini senantiasa berulang kalau tidak dibenahi akar permasalahannya"

Raker Bersama Kapolda dan Kajati Kalsel, Habib Aboe Pertanyakan Soal Banjir dan Peredaran Narkoba

KUTIPAN

Banjarmasin (05/02) --- Anggota Komisi III DPR RI, Aboebakar Al-Habsy bersama rombongan mengunjungi Mapolda Kalimantan Selatan dan menggelar Rapat Kerja dengan jajaran Polda Kalsel dan Kajati Kalsel, hari ini, Jum'at (05/02).

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe, Raker yang dilakukan merupakan bagian dari Kunjungan Spesifik yang dilakukan oleh Komisi III ke Kalimantan Selatan. Agenda utamanya adalah monitoring kinerja serta membahas isu-isu yang menjadi atensi publik di Kalsel.

"Saya mengapresi support yang diberikan pihak Polda Kalsel dalam penanganan banjir, baik dalam tahap evakuasi, dukungan logistik maupun pengamanan. Saya mendapat informasi setidaknya ada 3 ribu personel yang diperbantukan untuk membantu dampak banjir," terang Habib Aboe.

Sekjen DPP PKS ini menambahkan, sesungguhnya peran dari Polri dalam bencana seperti ini sangat membantu masyarakat.

"Namun demikian saya dapat banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai persoalan banjir ini, apa yang sebenarnya menjadi penyebab banjir di Kalsel sehingga bisa sedemikian hebat. Apakah pihak polda sudah melakukan kajian soal ini ? apakah sudah ditemukan penyebabnya ?," tanya Habib Aboe.

Persoalan lain, kata Habib Aboe, yang kerap disorot di Kalsel adalah soal peredaran narkoba.

"Saya mengapresiasi Direktorat Narkoba Polda Kalsel yang kemarin tanggal 13 Januari mengamankan 11 kg sabu dari para kurir yang ditangkap di area parkir Duta Mall," ungkapnya.

Namun disisi lain, imbuh Habib Aboe, BNNP Kalsel mengatakan, pihaknya justru menganalisa adanya indikasi kenaikan aktivitas peredaran narkotika selama pandemi Covid-19.

"Langkah apa saja yang dilakukan oleh Polda untuk mencegah peningkatan aktifitas peredaran narkoba di era pandemic ini ? dan apakah sudah ada sinergi di BNNP Kalsel ? mohon dijelaskan ?," tanya Habib Aboe.

Untuk Kejati Kalsel, lanjutnya, pihaknya memberikan dukungan penuh persiapan Kejati menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

"Akhir tahun kemarin saya sudah memantau langsung kesiapan Kejati Kalsel menuju WBBM, saya berharap ini dipersiapkan dengan baik, dan semoga bisa lolos mendapatkan WBBM," ujarnya.

Habib Aboe mengingatkan agar setiap perkara narkoba yang dilimpahkan ke kejaksaan mendapatkan atensi yang serius dan dituntut secara maksimum. Soal penuntutan narkoba ini memang selalu menjadi bahan diskusi dengan para kajati sebelumnya.

"Karena ini merupakan ancaman nyata untuk generasi Banua. Ini sangat merusak generasi muda dan masa depan negara kita. Karenanya kita tidak boleh kompromi, kita harus tegas soal ini. Saya harap ini menjadi atensi khusus," tegas Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ini.

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI
Anggota Komisi III DPR RI

"Saya mengapresi support yang diberikan pihak Polda Kalsel dalam penanganan banjir, baik dalam tahap evakuasi, dukungan logistik maupun pengamanan. Saya mendapat informasi setidaknya ada 3 ribu personel yang diperbantukan untuk membantu dampak banjir"

Usut Tuntas!
Temuan Penggunaan Hutan Tanpa Izin di 8 Provinsi Senilai Rp577 T

KUTIPAN

“PNBP tambang, yang belum dipungut pada 1.707 unit perusahaan seluas 8.713.167,58 hektar adalah sekitar Rp 292,9 triliun. Sehingga total PNBP yang belum dipungut untuk kebun dan tambang tanpa izin tersebut mencapai Rp577,1 Triliun. Itu nominal yang sangat besar dan bisa digunakan negara untuk kebutuhan masyarakat yang lain. Perlu sikap tegas negara dalam mengusut tuntas kasus ini”

drh. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI

Temuan Penggunaan Hutan Tanpa Izin di 8 Provinsi Senilai Rp577 T, Aleg PKS: Harus Diusut Tuntas!

KUTIPAN

Temuan tersebut menyusul ekspos yang dilakukan kepala daerah (gubernur dan bupati/wali kota) di hadapan Tim Gabungan Penegak Hukum Pusat yang terdiri dari Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Jakarta (10/02) -- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), drh Slamet, menyoroti temuan penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural atau tanpa izin di delapan provinsi di Indonesia yang merugikan negara hampir sekitar Rp 577 triliun.

Temuan tersebut, kata Slamet, menyusul ekspos yang dilakukan kepala daerah (gubernur dan bupati/wali kota) di hadapan Tim Gabungan Penegak Hukum Pusat yang terdiri dari Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

"Tentu temuan ini perlu ditindaklanjuti dengan langkah yang konkret dari aparat penegak hukum terhadap para pelaku," kata Slamet, Selasa (08/02/2021).

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, penggunaan kawasan hutan tanpa izin tersebut mengakibatkan adanya pembukaan kebun dan tambang tanpa izin.

Slamet menuturkan, tercatat ada Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP untuk kebun yang belum dipungut pada 878 unit perusahaan seluas 8.456.772,05 hektar dengan nilai sekitar Rp 292,9 triliun.

Sementara PNBP tambang, imbuhnya, yang belum dipungut pada 1.707 unit perusahaan seluas 8.713.167,58 hektar adalah sekitar Rp 292,9 triliun. Sehingga total PNBP yang belum dipungut untuk kebun dan tambang tanpa izin tersebut mencapai Rp577,1 Triliun.

"Itu nominal yang sangat besar dan bisa digunakan negara untuk kebutuhan masyarakat yang lain. Perlu sikap tegas negara dalam mengusut tuntas kasus ini," pungkasnya.

drh. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI

"PNBP tambang, yang belum dipungut pada 1.707 unit perusahaan seluas 8.713.167,58 hektar adalah sekitar Rp 292,9 triliun. Sehingga total PNBP yang belum dipungut untuk kebun dan tambang tanpa izin tersebut mencapai Rp577,1 Triliun. Itu nominal yang sangat besar dan bisa digunakan negara untuk kebutuhan masyarakat yang lain. Perlu sikap tegas negara dalam mengusut tuntas kasus ini"

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Keberatan FPKS DPR Diterima, Anggaran untuk Penyuluh Swadaya Batal Dihapus

KUTIPAN

Para penyuluh swadaya itu, direkrut dari kalangan petani yang berprestasi. Kapasitas dan semangat mereka diatas rata-rata petani. Mereka menjadi pionir teknologi baru. Mereka menjadi rujukan para petani,

Jakarta (09/02) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, mengungkapkan langkah Fraksi PKS menolak tegas rencana Kementerian Pertanian (Kementan) menghapus anggaran Penumbuhan dan Penguatan P4S (Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya) membuahkan hasil.

Dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian membahas realokasi dan refocusing anggaran 2021 disepakati anggaran Penumbuhan dan Penguatan P4S tidak dihapus, tetap seperti semula Rp3.560 Miliar

"Ini berarti di tahun 2021 ini penyuluh swadaya tetap terima insentif," ujar Hermanto.

Menurutnya, anggaran Penumbuhan dan Penguatan P4S antara lain dialokasikan untuk insentif para penyuluh swadaya agar mobilitas mereka tinggi.

"Dengan insentif tersebut, mereka diberi tanggung jawab membina para petani di kawasan desanya," ucap legislator dari FPKS ini.

"Peran penyuluh swadaya sangat penting sebagai salah satu ujung tombak keberhasilan program Kementerian Pertanian," tambahnya.

Para penyuluh swadaya itu, jelas Hermanto, direkrut dari kalangan petani yang berprestasi.

"Kapasitas dan semangat mereka diatas rata-rata petani. Mereka menjadi pionir teknologi baru. Mereka menjadi rujukan para petani," papar Hermanto.

Lebih jauh ia mengungkapkan, satu desa satu penyuluh adalah mandat UU nomor 16 tahun 2006 tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan.

"Sudah sekitar 15 tahun, mandat undang-undang tersebut belum juga bisa direalisasikan," ujarnya.

Keberadaan para penyuluh swadaya, lanjutnya, bisa mengisi kekurangan tenaga penyuluh tersebut.

"Kalau anggarannya dihapus, kita kehilangan ujung tombak pembangunan pertanian," pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.

Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

“Anggaran Penumbuhan dan Penguatan P4S antara lain dialokasikan untuk insentif para penyuluh swadaya agar mobilitas mereka tinggi. Dengan insentif tersebut, mereka diberi tanggung jawab membina para petani di kawasan desanya, Peran penyuluh swadaya sangat penting sebagai salah satu ujung tombak keberhasilan program Kementerian Pertanian.”

Legislator PKS Nilai Perlu 'Strategic Planning' untuk Realisasikan Program Terobosan KKP 2021

KUTIPAN

Jakarta (09/02) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menanggapi adanya tiga program terobosan KKP 2021-2024 dalam rangka meningkatkan pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia.

"Saya melihat selama ini belum ada konsep negara maritim yang menjadi cita-cita nasional dalam rangka membangun Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh", ujar Johan.

Karenanya, Johan menilai, diperlukan strategic planning yang visioner untuk merealisasikan berbagai program terobosan KKP (Kementerian Kelautan Perikanan).

Hal tersebut diungkapkan Johan setelah mengikuti rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Hari Selasa (9/2) di DPR Senayan Jakarta.

Politisi PKS ini mengingatkan agar KKP harus sadar bahwa sarana dan prasarana bidang kelautan perikanan kita dinilai masih sangat tertinggal.

"Jauh diantara negara tetangga ASEAN sehingga perlu strategic planning agar sebagai negara maritim yang punya sejarah besar kita bisa bangkit dan maju berdasarkan potensi kemaritiman kita dan sumberdaya manusia yang maju dan mencintai maritim," papar Johan.

Legislator dari Pulau Sumbawa ini berharap segera disusun kebijakan dengan anggaran memadai untuk pembangunan kelautan nasional secara komprehensif termasuk kebijakan ekonomi kelautan dan tata Kelola kelautan.

"Jika KKP akan mereview perikanan tangkap untuk meningkatkan PNBP (pendapatan negara bukan pajak) dari Rp 600 miliar menuju ke Rp 12 triliun maka saya mengusulkan agar KKP menjadikan perikanan tangkap sebagai sumber produksi ikan yang utama sehingga diperlukan planning system yang baik sebagai negara agraris yang mampu memenuhi kebutuhan pangan dari sektor perikanan dengan memperkuat infrastruktur perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan lokal," tutur Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 Pulau Sumbawa ini melihat bahwa kebijakan pembangunan kelautan dan manajemen pembangunan kelautan haruslah merupakan keterpaduan antara sektor kelautan dan daratan serta menyatu dalam strategi pembangunan nasional untuk kesejahteraan bangsa.

"Dari sisi anggaran saya menyesalkan setiap tahun selalu menurun padahal kita mesti mengoptimalkan potensi laut kita", ujar Johan.

Selanjutnya Johan berharap adanya formulasi pembangunan kelautan dan perikanan untuk merealisasikan rencana terobosan KKP dan perbaikan tata kelola kelautan agar bidang kelautan menjadi sebuah bidang unggulan dalam perekonomian nasional.

"Saya selalu mendorong KKP agar menggerakkan perikanan budidaya untuk peningkatan ekonomi masyarakat serta pemulihan ekonomi masyarakat dengan membangun kampung-kampung perikanan secara optimal," tutup Johan.

H. JOHAN ROSIHAN, S.T
Anggota Komisi IV DPR RI

> "KKP harus sadar bahwa sarana dan prasarana bidang kelautan perikanan kita dinilai masih sangat tertinggal. Jauh diantara negara tetangga ASEAN sehingga perlu strategic planning agar sebagai negara maritim yang punya sejarah besar kita bisa bangkit dan maju berdasarkan potensi kemaritiman kita dan sumberdaya manusia yang maju dan mencintai maritim"

Anggota FPKS Minta Food Estate Jangan Dijadikan Citra Saja Tanpa Eksekusi Terukur

KUTIPAN

Jakarta (08/02) --- Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mengatakan,

program food estate yang lagi dijadikan pemerintah sebagai andalan untuk menyelesaikan persoalan pangan di masa depan seolah masih jauh dari harapan.

Akmal menerangkan, pada rangkuman informasi APBN 2021 pada program ketahanan pangan, Pengembangan Food Estate di Kalteng, Sumsel dan Papua (Merauke) untuk meningkatkan produktivitas pangan antara lain dengan pemberdayaan petani existing dan investasi small farming pada lahan seluas 165.000 Hektar.

"Bagaimana Pogram food estate ini kita semua tidak ragu, bila faktor utama yakni anggaran negara dari APBN untuk kementerian Pertanian saja di potong sebesar Rp 6,3 Triliun, dari semula Rp 21,8 Triliun menjadi Rp 15,5 Triliun", tutur Akmal.

Politisi PKS ini meminta bahwa mega proyek food estate ini hanya untuk cari citra saja, tanpa dibarengi dengan tindakan-tindakan terukur yang dapat dikendalikan pemerintah itu sendiri. Pemotongan sektor pangan yang begitu besar bukan saja kementan, bahkan seluruh mitra komisi IV, semua terjadi pemotongan dari dasar Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-30/MK/02/2021.

Berdasarkan informasi yang ia terima dari berbagai sumber, Legislator asal Sulawesi Selatan II ini melihat sudah mulai ada gejala-gejala yang tidak lurus pada eksekusi pelaksanaan food estate. Meskipun ia mengakui bahwa banyak pihak yang belum menyetujui secara penuh program food estate ini mau diapakan, termasuk komisi IV DPR RI dan fraksi nya di PKS.

Informasi yang didapat, salah satunya adalah Petani yang lahannya masuk ke dalam program lumbung pangan atau food estate mengeluhkan penurunan hasil produksi gabah bahkan berujung gagal panen.

"Saya mendapat informasi yang menyedihkan, bahwa hampir 90 persen petani pada areal food estate tidak mendapatkan hasil panen yang memuaskan dari lahan seluas 1.000 hektare (Ha). Contohnya ada pada Petani di Desa Belanti Siam, di wilayah Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, hanya memperoleh hasil 1,5 ton gabah per Ha sawah, bahkan ada yang kurang dari itu, padahal biasanya mencapai 3,5-4 ton. Ini setelah mulai ada eksekusi program food estate", kritis Akmal.

Anggota Komisi IV ini juga mengkritisi, dampak lingkungan yang saat ini sudah mulai memperlihatkan keganjilan-keganjilan. Ia menganggap, bahwa alam ini sudah mulai menegur dengan banjir, longsor dan berbagai bencana lain akibat ulah manusia yang merusak keseimbangan alam.

Akmal tidak menutup gagasan food estate ini yang nantinya menuju cita-cita kedaulatan pangan nasional dimana kecukupan pangan dapat dipenuhi dari dalam negeri. Pangan melimpah, harga murah untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi yang ia minta agar pemerintah tidak membuat halu masyarakat dengan membuai adanya kehebatan negara kita yang akan mampu menciptakan kondisi pangan nasional stabil dan terjangkau. Menurutnya, Contoh mobil nasional sudah cukup jadi pelajaran berharga, jangan diulang pada program-program lainnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

> "Bagaimana Pogram food estate ini kita semua tidak ragu, bila faktor utama yakni anggaran negara dari APBN untuk kementerian Pertanian saja di potong sebesar Rp 6,3 Triliun, dari semula Rp 21,8 Triliun menjadi Rp 15,5 Triliun"

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Tol Cipali Amblas, Anggota Komisi V FPKS Desak BPJT Beri Sanksi Operator Tol

KUTIPAN

Salah satu sanksi yang bisa dikenakan pada operator Tol, adalah tidak memberikan ijin kenaikan tarif Tol berkala. Sesuai dengan UU no. 38/2004 tentang Jalan, tarif Tol dapat dinaikan setiap 2 tahun sekali. Namun kenaikan akan tetap mempertimbangkan SPM tol yang terus dievaluasi BPJT

Jakarta (10/02) –– Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo, mendesak Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memberikan sanksi kepada operator Tol Cipali menyusul amblasnya Tol tersebut di KM 122+400.

"Sejak Selasa malam saya banyak mendapat keluhan dari warga yang menggunakan Tol Cipali yang amblas di KM 122. Selain membahayakan juga menyebabkan antrian panjang. Dan sudah seharusnya BPJTebagai badan yang mengatur penyelenggaraan jalan tol, BPJT memberikan sanksi kepada operator Tol Cipali karena ketidakmampuannya menjaga Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol." Kata Sigit.

Salah satu sanksi yang bisa dikenakan pada operator Tol, kata Sigit, adalah tidak memberikan ijin kenaikan tarif Tol berkala. Sesuai dengan UU no. 38/2004 tentang Jalan, tarif Tol dapat dinaikan setiap 2 tahun sekali. Namun kenaikan akan tetap mempertimbangkan SPM tol yang terus dievaluasi BPJT.

"Amblasnya KM 122 ini harus menjadi raport merah buat operator Cipali. Jika mereka mengajukan usulan kenaikan tarif, BPJT jangan setujui. Ini sanksi buat operator agar benar-benar menjaga SPM dan tidak merugikan pengguna jalan yang sudah membayar, " Kata Sigit dari FPKS DPR RI.

Disisi lain Sigit mengatakan pengguna jalan tol Cipali yang merasa dirugikan dengan amblasnya ruas tol tersebut dapat mengajukan kompensasi. Hal itu diatur dalam Pasal 87 PP No. 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

"Pengguna jalan tol berhak menuntut ganti kerugian kepada Badan Usaha atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol." Kata Sigit.

Seperti diketahui sejak Selasa dinihari Tol Cipali di ruas KM 12+400 amblas dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Perbaikan amblasnya jalan Tol Cipali diperkirakan membutuhkan waktu hingga dua pekan.

Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO
Anggota Komisi V DPR RI

"Sejak Selasa malam saya banyak mendapat keluhan dari warga yang menggunakan Tol Cipali yang amblas di KM 122. Selain membahayakan juga menyebabkan antrian panjang. Dan sudah seharusnya BPJTebagai badan yang mengatur penyelenggaraan jalan tol, BPJT memberikan sanksi kepada operator Tol Cipali karena ketidakmampuannya menjaga Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol"

Komisi V DPR Dorong Kemenhub Tertibkan Kabel Optik di Selat Malaka

KUTIPAN

Jakarta (7/2) –- Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk menertibkan kabel-kabel fiber optik yang berserakan di sepanjang Selat Malaka.

Diketahui, pemasukan negara dari hasil bongkar muat ekspor-impor di Selat Malaka hanya 10 persen, disinyalir karena ketidaknyamanan kapal asing melintasi Selat Malaka karena dipenuhi kabel fiber optik di dasar laut.

"Ternyata Selat Malaka itu 60 persen adanya di Indonesia, 40 persen terbagi antara Singapura dan Malaysia. Tetapi, kapal-kapal asing yang lewat di sana (Selat Malaka) hanya melewati garis Indonesia sebesar 10 persen saja," tutur Syahrul Aidi Maazat di ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/2/2021).

Politisi Fraksi F-PKS tersebut berharap Dirjen Perhubungan Laut dapat mengambil tindakan penertiban. Menurutnya, pemasukan melalui Selat Malaka ini memiliki potensi yang sangat besar untuk devisa negara.

Lanjut Syahrul, dirinya mengkonfirmasi kembali ketersediaan anggaran untuk hal tersebut apabila penyelesaian kabel optik ini menjadi ranahnya Dirjen Perhubungan Laut dan meminta agar anggaran yang diajukan kembali di-refocusing, sehingga penanganan kabel fiber optik dapat direalisasikan di tahun 2021, serta menambahkan fasilitas lainnya guna mendukung peningkatan kas negara melalui Selat Malaka.

"Kita mendorong pemerintah untuk menyediakan fasilitas-fasilitas. Karena kalau kapal sudah bersandar, sudah melewati sebuah negara, itu banyak sekali pemasukan ke negara itu. Air bisa kita berikan, kemudian bagaimana kebersihan sampahnya dan lain-lain," pungkas Syahrul, Politisi asal Riau dalam Rapat Dengar Pendapat.

Senada dengan itu, Anggota Komisi V DPR RI Cen Sui Lan menambahkan permasalahan fiber optik bawah laut yang berserakan di Selat Malakan telah merugikan Indonesia. Politisi dapil Kepulauan Riau itu meminta Dirjen Perhubungan Laut untuk memikirkan secara matang permasalahan mengenai hal tersebut. (hal,fit/sf)

H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.
Anggota Komisi V DPR RI

"Ternyata Selat Malaka itu 60 persen adanya di Indonesia, 40 persen terbagi antara Singapura dan Malaysia. Tetapi, kapal-kapal asing yang lewat di sana (Selat Malaka) hanya melewati garis Indonesia sebesar 10 persen saja

PKS

Sukses bukan lantaran diberi. Buah kegigihan dari cinta membara.

PKS hadir membangun negeri. Supaya rakyat hidup sejahtera.

Habib Aboe
Sekjen PKS

fraksi.pks.id Fraksi PKS DPR RI fraksipksdprri @fpksdprri PKS TV DPR RI

Anggota FPKS Minta BKPM Memperkuat Intrumen Investasi di Daerah

KUTIPAN

Jakarta (06/02) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI dan Badan Koordinasi Penanaman Modal agar BKPM memperkuat instrumen investasi di daerah sehingga perkembangan ekonomi di daerah semakin progresif dan signifikan.

Beberapa hal di daerah yang dapat dilakukan dengan peran BKPM menurut nevi akan memberi percepatan geliat perekonomian di daerah. Diantaranya adalah, adanya Dana Alokasi Khusus untuk peningkatan kapasitas dan sosialisasi terkait perizinan dan OSS, penambahan anggaran pengawasan pelaksanaan penanaman modal di provinsi dalam rangka peningkatan realisasi investasi, dan Membantu daerah menyiapkan studi kelayakan terkait dg sektor unggulan potensi investasi di daerah.

"Selain DAK, pengawasan dan studi kelayakan, membantu daerah utk menyiapkan strategi promosi dalam rangka peningkatan minat investasi di daerah dan membentuk kawasan pertumbuhan ekonomi seperti Kawasan ekonomi khusus dan kawasan induatri yang baru di luar pulau jawa dalam rangka pemerataan investasi akan semakin menambah potensi pertumbuhan iklim bisnis di daerah", tambah Nevi.

Politisi PKS ini mencatat BKPM merealisasikan investasi melebihi target pada 2020 sebesar Rp 826,3 triliun, dan lebih besar dari realisasi 2019. Investasi sepanjang tahun 2020 ditopang oleh penanaman modal dalam negeri sebesar 50,1% atau naik 7% secara year on year (yoy), menjadi sejarah baru karena dalam lima tahun terakhir investasi selalu ditopang oleh modal asing atau foreign direct investment (FDI). Namun ia menduga, bahwa asing lebih enggan berinvestasi karena pandemi dan lebih menahan sumberdayanya menunggu pandemi usai.

"Dari sini kita dapat melihat bahwa potensi sumberdaya dalam negeri mampu mengalahkan asing dalam persoalan investasi. Ini berarti, selama ini potensi dalam negeri belum tergali optimal dan masih akan ada potensi-potensi lain yang sesungguhnya dalam negeri mampu untuk lebih berdaya dibandingkan sumber daya asing", urai Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini memberi apresiasi kepada BKPM yang telah di capaian BKPM yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Namun ia menyarankan agar UMKM dapat diberikan porsi yang lebih dari sebelumnya. Pelaksanaan investasi harus sejalan dengan upaya pengembangan UMKM, mengingat UMKM merupakan kekuatan ekonomi rakyat dan menjadi kontributor sebesar 61,1% bagi PDB nasional di tahun 2018.

Anggota Fraksi PKS ini juga meminta kepada BKPM agar investasi di daerah mengarah pada padat karya. Dan arah dari investasi ini jangan yang menguras Sumber Daya Alam Indonesia. Ia juga meminta agar investasi dapat dilakukan secara merata se Indonesia. Ada proprsi yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

> Saya berharap kedepannya BKPM mampu menjadi lembaga yang berperan besar pada penumbuhan usaha kecil menengah sehingga dalam waktu di masa depan, terjadi keseimbangan kekuatan ekonomi rakyat yang dapat ditunjukkan pada gini rasio yang tidak terlalu jauh"

Politisi PKS Desak Pemerintah Proaktif Lindungi Merek Lokal

KUTIPAN

Surabaya (10/02) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak pemerintah untuk proaktif melindungi karya inovasi anak bangsa dengan memberikan kepastian hukum sesuai undang-undang yang berlaku.

Menurut Amin, upaya anak bangsa untuk bersaing baik di pasar dalam negeri dari serbuan produk impor maupun di pasar global sudah sepatutnya memperoleh dukungan dan perlindungan hukum.

"Gerakan mencintai produk dalam negeri yang digaungkan pemerintah saat ini harus seiring dengan penguatan merek lokal secara hukum agar mampu bersaing secara aman dari sisi hukum dengan merek global," pungkasnya.

Dengan penduduk 270 juta jiwa, lanjut Amin, maka Indonesia merupakan pasar yang sangat menarik bagi merek global.

"Perlindungan merek diperlukan agar produk lokal memiliki jaminan perlindungan dan kepastian hukum di bidang merek sehingga mampu bersaing dengan produk asing," kata Amin.

Menurut Amin, seiring makin pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa antar negara, maka potensi munculnya persoalan hukum terkait merek juga makin besar.

Karena itu, Amin mendesak pemerintah proaktif dalam perlindungan hukum dengan cara mengembangkan early warning system. Sehingga pemilik merek lokal bisa mencegah terjadinya potensi gugatan hukum dikemudian hari terhadap mereka manakala produk mereka laku keras di pasaran.

"Kami mengapresiasi dan mendukung pengusaha pribumi dalam melakukan inovasi. Oleh karena itu diperlukan kepastian hukum sesuai UU yang berlaku, dengan prinsip-prinsip memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi pengusaha pribumi untuk dapat bersaing dengan pengusaha global," tegasnya.

Lebih lanjut Amin mengatakan, Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah cukup memadai untuk melindungi inovasi dan hak intelektual masyarakat khususnya produk dari pengusaha dalam negeri. Bahkan sudah dipermudah lagi dengan adanya UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sementara itu di UU Cipta Kerja tersebut, proses pendaftaran merek semakin cepat. Ada perubahan terhadap alur proses pendaftaran merek sehingga mempercepat penyelesaian proses pendaftaran merek. Prosesnya dipercepat dari 150 hari ke 120 hari.

"Kami mengingatkan bahwa tujuan UU merek adalah menjamin pelindungan potensi ekonomi lokal dan nasional," ujar Amin.

AMIN AK,M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

"Upaya anak bangsa untuk bersaing baik di pasar dalam negeri dari serbuan produk impor maupun di pasar global sudah sepatutnya memperoleh dukungan dan perlindungan hukum. Gerakan mencintai produk dalam negeri yang digaungkan pemerintah saat ini harus seiring dengan penguatan merek lokal secara hukum agar mampu bersaing secara aman dari sisi hukum dengan merek global"

Catatkan Laba di Tahun 2020,

Aleg PKS: BUMN Lain Perlu Tiru Pertamina

KUTIPAN

Jakarta (07/02) --- Ditengah suramnya kinerja hampir semua sektor usaha sebagai imbas Pandemi Covid-19, kita dapat kabar menggembirakan. Pertamina meraih laba hampir USD 1 Milliar pada tahun 2020.

"Ini tentu perlu diapresiasi dan dijadikan contoh untuk BUMN-BUMN lain. Penghargaan kepada jajaran Komisaris dan Direksi Pertamina. Pertamina sebagai BUMN energi andalan Negeri mampu memberikan harapan bagi negeri ini," Demikian disampaikan Mahfudz Abdurrahman, Anggota Komisi VI DPR RI di Jakarta.

"Kita tentu bergembira hati dan bersukacita atas sangat baiknya laporan Kinerja Pertamina pada Tahun 2020, perolehan laba luar biasa," imbuhnya.

ukan hanya nominalnya yang mencapai USD 1 Miliar, kata Mahfudz, tapi yang lebih penting, perolehan laba didapat pada saat kondisi perekonomian berada dalam kondisi berat, bahkan sudah masuk dalam jurang resesi.

"Pandemi Covid19 yang sudah hampir 1 tahun kita hadapi dan sepertinya belum ada tanda-tanda akan berakhir, sangat berat kita rasakan, di semua bidang dan di seluruh dunia. Termasuk kita di Indonesia," ungkapnya.

Mahfudz menambahkan, BUMN-BUMN kita yang menjadi penyokong penting dalam perekonomian, terkena imbas yang lumayan berat. Kita bisa lihat dari laporan kinerja BUMN, dari semua sektor mengalami penurunan laba yang signifikan dan bahkan ada yang merugi.

"Padahal dari BUMN lah kita mengharapkan Deviden, sebagai salah satu sumber pendapatan pada APBN kita. Tak terkecuali Pertamina, mengalami hambatan dan tantangan berat. Namun ternyata mampu meraih laba signifikan, ini tentu hasil dari komitmen dan kemampuan Jajaran Komisaris dan Direksi Pertamina yang mumpuni, mereka mampu menciptakan dan memanfaat peluang ditengah tantangan yang berat. Dan juga kita harus memberikan apresiasi kepada Menteri BUMN RI saudara Erick Tohir beserta jajaran, yang mampu melaksanakan fungsi pengarahan dan pengawasan dengan baik," lanjut Anggota DPR RI dari Dapil Kota Depok dan Kota Bekasi.

"Saya juga berharap semua BUMN, khususnya yang selama ini memberikan dampak signifikan bagi perekonomian negeri. Bisa mencontoh kinerja Pertamina, supaya bisa meraih laba, bukan malah sebaliknya menjadi BUMN yang merugi. Dan Jajaran Kementerian BUMN RI harus memperkuat arahan (guidance) dan pengawasannya kepada setiap BUMN," papar Mahfudz.

Kemampuan menciptaakan dan memanfatkan peluang, kata Mahfudz, menjadi hal yang penting, terlebih pada saat kondisi saat ini. BUMN harus mampu bertahan dan juga berkembang, tidak malah menurun kinerjanya. Kementerian BUMN RI harus memastikan semua Jajaran Komisari dan Direksi BUMN memiliki akhlaq atau perilaku yang baik dalam bekerja.

"Kalau ada yang disinyalir cacat dalam hal Akhlaq, segera disikapi dengan tegas, kita tidak boleh main-main dalam mengemban dan mengelola amanah rakyat Indonesia", ucap Bendahara Umum DPP PKS ini.

H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos
Anggota Komisi VI DPR RI

> "Saya juga berharap semua BUMN, khususnya yang selama ini memberikan dampak signifikan bagi perekonomian negeri. Bisa mencontoh kinerja Pertamina, supaya bisa meraih laba, bukan malah sebaliknya menjadi BUMN yang merugi. Dan Jajaran Kementerian BUMN RI harus memperkuat arahan (guidance) dan pengawasannya kepada setiap BUMN,

#MelawanLupa

JIWASRAYA RUGI BELUM KEMBALI, PMN SUDAH DIRAIH

Fraksi PKS Menolak Pencairan Dana PMN untuk Jiwasraya

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

2002
Perusahaan mengalami guncangan, tetapi masih mampu mencetak laba pada 2006 sehingga luput dari perhatian.

2014
Menjadi sponsor klub sepak bola dunia (Manchester City).

2016
Peringatan potensi gagal bayar dalam transaksi investasi dengan PT Hanson Internasional.

Jiwasraya tidak optimal mengawasi portofolio reksadana.

2017
Mengalami kekurangan pencadangan hingga **Rp7,7 triliun.** Sementara itu, Jiwasraya menyebutkan keuntung-an sekitar Rp360 miliar.

2018
Kerugian (audited) Jiwasraya mencapai **Rp15,3 triliun.**

2019
September 2019 kerugian mencapai **Rp13,7 triliun.**

November 2019 perseroan mengalami *negative equity* hingga **Rp27,2 triliun.**

2021
Jadi beban negara, PMN **Rp20 triliun.**

| Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan, 2020
| Grafis : Aditya Angga

Apa itu PMN

"Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara dan/atau perseroan terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi".

Berlebihnya Pasokan Listrik,

Wakil Ketua FPKS Minta Pemerintah Hentikan Impor dari Negara Tetangga

KUTIPAN

Jakarta (08/02) --- Dalam kondisi negara berlebih pasokan listrik seperti sekarang Pemerintah diminta tidak memilih opsi impor listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di beberapa wilayah.

Pemerintah disarankan membangun dan membenahi jalur distribusi listrik ke daerah-daerah terpencil agar pasokan listrik bisa merata.

Demikian tanggapan Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, terhadap dokumen revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang saat ini sedang dibahas DPR bersama Pemerintah.

Menurut Mulyanto, impor listrik ini harus dikurangi, bahkan dihentikan. Sebab akan terasa aneh jika di tengah surplus listrik seperti sekarang, Indonesia masih mengimpor listrik dari negara tetangga.

"Seperti diketahui pada tahun 2020 kita mengimpor listrik dari Serawak sebesar 110 MW, kemudian pada tahun 2021 rencananya impor untuk wilayah Kalimantan Barat ini masih akan berlanjut," ungkapnya.

Sementara secara nasional, lanjutnya, surplus listrik kita sudah lebih dari 30% dan program pembangunan pembangkit 35.000 MW terus berlanjut.

"Artinya pasokan listrik kita sudah cukup, bahkan berlebih. Yang dibutuhkan adalah bagaimana tingkat pemerataan listrik kita berbasis territorial. Akan menjadi aneh kalau secara nasional kita surplus listrik, sementara ada wilayah kita yang justru mengimpor listrik," ujar Mulyanto.

Mulyanto menambahkan keinginan Pemerintah untuk tetap melakukan impor listrik di RUPTL 2021-2030 mencerminkan lemahnya startegi ketahanan energi Indonesia.

"Hal itu bukan hanya membuat bangsa ini terus bergantung pada pasokan listrik dari negara lain tapi juga akan menambah defisit transaksi berjalan sektor energi," tegas Mulyanto.

Untuk itu, Mulyanto, minta Pemerintah bekerja ekstra keras dalam memberikan pemerataan listrik bagi warga, sesuai dengan fungsi negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Karena itu membangun jaringan listrik yang mampu menghubungkan pulau-pulau besar di Indonesia, yang membuat listrik dapat terkoneksi, menjadi sangat penting. Sehingga antara wilayah yang surplus dengan wilayah yang kekurangan listrik dapat dijembatani," papar Mulyanto.

Mulyanto menolak alasan Pemerintah melakukan impor karena harga impor listrik lebih murah dibandingkan memproduksi listrik sendiri. Selain itu pilhan sumber energinya untuk pembangkit di wilayah terpencil sangat terbatas.

Mulyanto mendesak Pemerintah untuk lebih serius lagi mengembangkan pembangkit dengan sumber energi yang kompetitif, misalnya dengan gas atau pembangkit tenaga surya.

"Jangan terlena dengan impor," tegas Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini," pungkasnya.

Mulyanto menyebut meskipun membangun pembangkit listrik sendiri sedikit mahal namun akan menyerap tenaga kerja lokal dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat, di samping menguatkan kemandirian bangsa.

Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

“impor listrik ini harus dikurangi, bahkan dihentikan. Sebab akan terasa aneh jika di tengah surplus listrik seperti sekarang, Indonesia masih mengimpor listrik dari negara tetangga.

Kunker ke Undip, Aleg PKS: Jangan Sampai RUU EBT Jadi Regulasi yang Mati

KUTIPAN

Jakarta (04/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty bersama Anggota Komisi VII DPR RI lainnya melakukan Kunjungan Kerja (kunker) Spesifik ke Pusat Studi Energi dan Lingkungan Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, dalam rangka FGD RUU Energi Baru Terbarukan (EBT), Jumat (05/02/2021) lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Saadiah menyatakan Bahwa Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) menjadi momentum yang menjamin adanya kepastian hukum bagi pengembangan energi terbarukan, serta memudahkan dan mempercepat proses transisi Indonesia dari penggunaan energi fosil menjadi energi terbarukan.

“RUU ET sangat diperlukan untuk memenuhi target porsi energi terbarukan di Indonesia sebesar 23% di tahun 2025 nanti. Di tahun 2019, porsi energi terbarukan di Indonesia baru mencapai 12% atau setara 10,17 gigawatt (MW). Hal ini patut diperhatikan karena cadangan energi fosil terus menurun, di sisi lain potensi energi terbarukan yang belum dimanfaatkan sangat besar,” ujarnya.

Menurut Saadiah yang hadir secara virtual, dengan adanya RUU EBT ini, dapat diarahkan untuk mengatasi krisis energi dan transisi dari energi fosil yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat.

Dalam aspek sosial dan lingkungan, imbuhnya, RUU EBT perlu diperhatikan juga ruang hidup bagi masyarakat untuk menghindari atau meminimalisasi dampak sosial dan lingkungan pada tingkat lokal.

“Ini terutama pada pembangunan energi terbarukan skala atau kapasitas besar di wilayah dengan nilai konservasi tinggi,” imbuhnya.

Dalam penyusunan RUU EBT tersebut, lanjutnya, UNDIP memberikan masukan agar pemerintah lebih memerhatikan soal Legal Evidance dan Empiric Evidence, yaitu adanya kepastian hukum dan fakta empirik mengenai kondisi energi di Indonesia.

"Selain itu, mengenai nuklir yang masuk dalam batang tubuh RUU EBT, Para ahli memberikan catatan serius agar pemerintah mendahulukan potensi EBT dan mempertimbangkan kembali penggunaan energi nuklir serta keamanan dan limbah radiaktif yang dapat merusak lingkungan," pungkas Saadiah.

Diharapkan, ungkap Saadiah, RUU EBT dapat dibahas dan ditetapkan menjadi Undang-Undang yang sesuai dengan harapan para ahli dan para politisi yang mewakili masyarakat.

"Dan juga semoga RUU EBT tersebut tidak menjadi regulasi yang mati dalam catatan lembaran negara, tetapi bisa berimplikasi luas dan diimplementasikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," tutup Saadiah.

SAADIAH ULUPUTTY, S.T
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

“RUU ET sangat diperlukan untuk memenuhi target porsi energi terbarukan di Indonesia sebesar 23% di tahun 2025 nanti. Di tahun 2019, porsi energi terbarukan di Indonesia baru mencapai 12% atau setara 10,17 gigawatt (MW). Hal ini patut diperhatikan karena cadangan energi fosil terus menurun, di sisi lain potensi energi terbarukan yang belum dimanfaatkan sangat besar

Aleg PKS: Bencana Alam di Luar DKI Jakarta Harus diperhatikan

KUTIPAN

Persoalan banjir ini juga termasuk persoalan pendangkalan sungai, kedislipinan masyarakat dalam membuang sampah, dan penataan sungai dari hulu sampai hilir itu juga belum tertata terutama di daerah-daerah mulai Garut, Jatigede, sampai Majalengka. Terjadi juga arus banjir tertinggi dalam kurun waktu yang mungkin baru terjadi pertama di daerah Pantura terutama Majalengka

Jakarta (10/02) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Subang, Nurhasan Zaidi kembali menegaskan masalah bencana alam yang masih terjadi di berbagai wilayah khususnya di daerah Jawa Barat.

Nurhasan menyatakan bahwa meskipun kerjasama penanggulangan bencana alam di DKI Jakarta sudah relatif baik, penyelesaian masalah longsor dan banjir di luar Jakarta masih harus menjadi perhatian.

"Pertama, yaitu persoalan longsor seperti persoalan tata kota dan amdal. Banyak seperti di Jatinangor, dan Cimanggung, di mana bukit diratakan menjadi perumahan yang akhirnya menyebabkan longsor dahsyat. Alhamdulilah Bupati Sumedang langsung moratorium terhadap pembangunan perumahan. Mudah-mudahan konsisten dengan janjinya." Jelas Nurhasan dalam PKS Legislative Report edisi Paripurna.

Selain longsor, anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jabar IX tersebut juga menegaskan bahwa masalah banjir masih harus dituntaskan hingga ke titik akar permasalahan.

"Kedua mengenai persoalan banjir. Persoalan banjir ini juga termasuk persoalan pendangkalan sungai, kedislipinan masyarakat dalam membuang sampah, dan penataan sungai dari hulu sampai hilir itu juga belum tertata terutama di daerah-daerah mulai Garut, Jatigede, sampai Majalengka. Terjadi juga arus banjir tertinggi dalam kurun waktu yang mungkin baru terjadi pertama di daerah Pantura terutama Majalengka." Jelas Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut.

Dalam menyambut masa reses, Nurhasan akan melakukan kunjungan langsung khususnya ke daerah Sumedang, Majalengka, dan Subang demi penyelesaian longsor dan banjir.

"Akar masalahnya apa, saya akan serap lebih detail. Karena ketika kita ambil keputusan kan harus dengan data, maka harus detail apa persoalan sebenarnya yang seringkali substansi masalahnya tidak terselesaikan." Tutup Nurhasan.

Sebelumnya, Nurhasan hadir sebagai salah satu anggota Komisi yang menghadiri penutupan masa Persidangan III DPR RI periode 2020-2021 secara langsung.

H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Persoalan longsor seperti persoalan tata kota dan amdal. Banyak seperti di Jatinangor, dan Cimanggung, di mana bukit diratakan menjadi perumahan yang akhirnya menyebabkan longsor dahsyat. Alhamdulilah Bupati Sumedang langsung moratorium terhadap pembangunan perumahan. Mudah-mudahan konsisten dengan janjinya"

Komisi IX Minta RSUP Hasan Sadikin Tingkatkan Kapasitas Tempat Tidur Pasien Covid-19

KUTIPAN

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar meminta kepada seluruh rumah sakit, khususnya kepada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Hasan Sadikin Bandung untuk melakukan peningkatan kapasitas Tempat Tidur (TT) bagi pasien Covid-19 melalui konversi persediaan TT.

Mengingat, jumlah kasus positif Covid-19 yang masih saja terus melonjak setiap hari.

Ansory menegaskan, pentingnya konversi TT tersebut mengantisipasi kemungkinan beberapa pasien Covid-19 bergejala yang tidak tertampung di rumah sakit. Demikian ditekankan Ansory saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke RSUP Hasan Sadikin Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kamis (4/2/2021).

"Jabar termasuk dalam zona 2 yaitu provinsi dengan Bed Occupancy Rate (BOR) TT Covid-19 sebesar 60-80 persen. Artinya, dari perkiraan populasi sebesar 49.317.000 maka dibutuhkan BOR TT layanan Covid-19 sebesar 78,8 persen. Untuk RSUP Hasan Sadikin, dari total 772 buah TT, terdapat 155 buah diantaranya digunakan untuk layanan Covid-19. Maka, total minimal TT yang harus dikonversi 232 buah," ujar Ansory.

Namun demikian, politisi Fraksi PKS tersebut mengingatkan penambahan kapasitas TT juga harus disesuaikan dengan kemampuan finansial maupun struktur RS. Bila RS tidak mampu mengonversi TT sesuai angka Kementerian Kesehatan, maka Ansory mengusulkan dapat dilakukan penambahan TT secara minimal sebagai bentuk partisipasi aktif publik.

Lebih lanjut, Ansory juga mengingatkan RSUP Hasan Sadikin pada khususnya dan seluruh RS pada umumnya di seluruh Indonesia juga tetap wajib memperhatikan para pasien non Covid-19 dalam melakukan pelayanan kesehatan. Terutama, sambung Ansory, bagi segenap pasien yang memiliki penyakit komorbid misalnya hipertensi, jantung, diabetes mellitus, dan penyakit katastropik lainnya.

"Atas dasar itulah, Komisi IX melakukan peninjauan secara langsung untuk melihat kesiapan konversi TT, pemenuhan logistik dan tenaga kesehatan bagi layanan Covid-19 di Jabar sebagai daerah zona 2 dan di RSUP Hasan Sadikin sebagai salah satu RS vertikal. Hal ini merupakan pelaksanaan dari fungsi pengawasan DPR RI yang akan menghasilkan rekomendasi kepada mitra kerja demi menjaga kualitas generasi bangsa," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan pada pertengahan Januari lalu, Menkes Budi Gunadi Sadikin akan melakukan penambahan kapasitas TT Covid-19 di RS vertikal sebanyak 30-40 persen dari kapasitas. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran (SE) Menkes nomor HK 02.01/Menkes/11/2021 tentang Peningkatan Kapasitas Perawatan Pasien Covid-19 pada RS Penyelenggara Pelayanan Covid-19.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

H. ANSORY SIREGAR, Lc,
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

"Penambahan kapasitas TT juga harus disesuaikan dengan kemampuan finansial maupun struktur RS. Bila RS tidak mampu mengonversi TT sesuai angka Kementerian Kesehatan, maka Ansory mengusulkan dapat dilakukan penambahan TT secara minimal sebagai bentuk partisipasi aktif publik."

Insentif Nakes Telat dan Berkurang, Aleg PKS: Ironi Saat Pandemi Semakin Menjadi

KUTIPAN

Jakarta (04/01) --- Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menyayangkan pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes).

Pemotongan insentif sangat ironis ditengah angka kasus Covid-19 yang terus meningkat dan sudah tembus lebih dari 1 juta kasus.

"Inikah cara pemerintah berterimakasih kepada tenaga kesehatan yang selama pandemi menjadi pahlawan tanpa tanda jasa? Pembayaran untuk tenaga kesehatan daerah masih banyak tertunda dan tiba-tiba sekarang besaran insentif tenaga kesehatan diturunkan. Sungguh sangat tidak manusiawi," kata Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (04/02).

Mufida menekankan beban kerja dari para tenaga kesehatan ini semakin berat. "Menjadi sangat ironis ketika beban kerja semakin tinggi, insentif bagi pejuang benteng terakhir penanggulangan covid-19 ini justru dikurangi sangat besar," ungkapnya.

Menurut Mufida, Pemerintah seperti tidak punya kepekaan terhadap beban kerja para tenaga kesehaan hari-hari ini yang harus berjibaku dengan pasien yang membludak, bahkan Instalasi Gawat darurat (IGD) penuh dengan peralatan yang juga terbatas. Padahal dalam bekerja, para tenaga kesehatan ini mempertaruhkan nyawa mereka dengan risiko tinggi terpapar covid-19.

"Sampai 27 Januari sudah 647 tenaga kesehatan yang wafat terpapar covid-19 dan menjadi yang tertinggi di Asia. Paling banyak juga terjadi di bulan Desember ketika jumlah kasus positif sedang tinggi seperti juga di awal tahun ini," terang dia.

Belum lagi pengorbanan para tenaga kesehatan untuk berpisah dengan keluarga sementara waktu untuk mengurangi risiko penularan. Sementara sarana perlindungan diri mereka dalam bertugas seperti ketersediaan APD juga seringkali kurang memadai.

"Bahkan tidak sedikit tenaga medis yang harus memproteksi diri dengan perlengkapan yang dibeli dengan uang sendiri karena masih terbatasnya APD. Banyak diantara tenaga medis yang tertular ini karena APD yang tidak memadai dan harus bertukar APD," papar Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini.

Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini mengkhawatirkan penurunan insentif yang cukup besar bisa berakibat menurunnya semangat juang dan mental para petugas medis ini, meskipun ia meyakini jiwa pengabdian para tenaga kesehatan ini sangat tinggi.

Belum lagi perilaku masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan yang menambah beban berat kerja para tenaga kesehatan. Oleh karena itu Mufida meminta Menteri Kesehatan meninjau kembali kebijakan ini.

Mufida meminta agar insentif tenaga kesehatan dikembalikan seperti semula, bahkan seharusnya bisa ditambah lagi dengan kondisi beban kerja yang sangat tinggi saat ini.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
Anggota Komisi IX DPR RI

"Hargai dan berikan apresiasi yang layak kepada para tenaga medis yang berjuang dalam penanganan covid ini. Mereka berjuang demi kemanusiaan dan menjadi yang paling banyak berkorban diantara kelompok masyarakat lain dalam penanganan pandemi ini. Apalagi selama ini masalah insentif ini juga sudah banyak persoalan seperti insentif yang telat cair terutama di daerah-daerah."

Pemerintah Siapkan SPSK PMI ke Arab Saudi, Aleg PKS: Kita Tak Ingin Kejadian Taiwan Berulang

KUTIPAN

Jakarta (04/02) --- Pemerintah telah menyiapkan implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) untuk menempatkan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi yang diuji coba dengan 280 pekerja pada akhir Februari tahun ini.

Melalui skema SPSK, sistem perjanjian/kontrak bagi pekerja migran bukan lagi dengan user (pengguna/majikan), melainkan dengan pihak ketiga berbadan hukum yang disebut syarikah (perusahaan).

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani meminta Pemerintah memastikan kesiapan pelaksanaan program SPSK penempatan PMI ke Arab Saudi tersebut agar kejadian penolakan pekerja Indonesia di Taiwan tidak terjadi lagi.

"Pastikan kesiapan semua infrastruktur sistem satu kanal dalam ujicoba penempatan PMI ke Arab Saudi, termasuk masalah kesehatan yang sangat penting di masa pandemi ini. Lakukan semua prosedur dengan jujur dan transparan. Jangan sampai di negara tujuan terjadi masalah yang tidak diinginkan seperti kejadian penolakan PMI di Taiwan," kata Netty dalam keterangan medianya, Kamis (04/02).

Menurut Netty, jika terjadi lagi penolakan PMI akibat pengabaian prosedur standar kesehatan atau karena hal lain, tentu hal itu akan mencoreng wajah Indonesia di mata internasional untuk kedua kalinya.

"Jangan sampai dunia menilai Indonesia sembrono dan asal-asalan dalam mengirimkan pekerja. Selain mencoreng nama negara, hal ini juga dapat berimbas pada hubungan kerjasama dengan negara lainnya, " katanya.

Netty juga menyinggung soal tingginya kasus COVID-19 di tanah air yang membuat sejumlah negara waspada.

"Sangat wajar apabila banyak negara yang waspada hingga menutup akses masuk. Sedikit saja kesalahan terjadi terutama soal prokes COVID-19, ini akan membuat negara-negara lain kehilangan kepercayaannya. Dan tentunya ini dapat berdampak buruk terhadap kerjasama penempatan PMI di masa yang akan datang," tukas Netty.

Sebelumnya, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Suhartono menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah memanggil Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk memastikan kesiapan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam mengimplementasikan SPSK tersebut.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Taiwan melarang penempatan PMI di Taiwan tanpa batas waktu pada Rabu 16 Desember 2020. Taiwan menyebut Indonesia gagal meningkatkan akurasi tes swab Covid-19 sehingga tak bisa menjamin keamanan pekerja migran yang kembali ke sana.

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

"Pastikan kesiapan semua infrastruktur sistem satu kanal dalam ujicoba penempatan PMI ke Arab Saudi, termasuk masalah kesehatan yang sangat penting di masa pandemi ini. Lakukan semua prosedur dengan jujur dan transparan. Jangan sampai di negara tujuan terjadi masalah yang tidak diinginkan seperti kejadian penolakan PMI di Taiwan"

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Turut
Berduka
Cita

Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI
Turut Berduka Atas wafatnya

Supriyanto (Prie GS)

Budayawan Indonesia

Pada Jumat 12 Februari 2021 pukul 06.30 Wib.

Semoga Allah SWT menerima amal
ibadahnya serta menempatkannya
di tempat terbaik Jannah-Nya
Amin

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

SKB 3 Menteri Diluncurkan, Aleg PKS: Kuatkan Toleransi Keberagaman Dengan Pembiasaan dan Keteladanan

KUTIPAN

Jakarta (04/02) --- Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah angkat bicara mengenai SKB 3 Menteri tentang Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan Pemda.

Surat Keputusan Bersama (SKB) ini diluncurkan dengan Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 dan ditandangani oleh ketiga `karim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Pada satu sisi Ledia mengapresiasi lahirnya SKB ini dan berharap ke depannya para Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah Negeri bisa lebih tentram melaksanakan kegiatan belajar mengajar karena hak beragama mereka dihormati dan dilindungi.

Namun menurut Ledia muatan sebagaimana tertuang dalam SKB 3 tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Permendikbud No 45 tahun 2014 mengenai Pakaian Seragam Sekolah Peserta Didik, dimana dalam Permendikbud tersebut telah menjelaskan jenis jenis seragam sekolah dan menegaskan bahwa pihak sekolah dalam penerapan seragam sekolah itu harus memperhatikan hak warga negara untuk menjalankan keyakinannya masing-masing.

Hanya sayangnya sebagaimana banyak aturan lain yang seringkali lemah dalam hal implementasi dan pengawasannya, Permendikbud no 45 tahun 2014 ini pun bernasib sama. Namun alih-alih meneguhkan implementasi dan pengawasan justru pemerintah memilih memunculkan kebijakan baru.

"Jadi sebetulnya kita sudah punya Peraturan Mendikbud no 45 tahun 2014 yang mengatur soal seragam sekolah dan hal itu mengikat baik bagi siswa, pendidik juga tenaga pendidikan di sekolah. Tapi mungkin dirasa kurang menggigit ya sampai dikeluarkan pula SKB 3 Menteri." kata Ledia

Kehadiran SKB ini menurut Pemerintah juga akan menjadi jalan untuk menghilangkan intoleransi pada siswa. Meski ini merupakan gagasan yang baik Ledia mengingatkan bahwa pemahaman mengenai intoleransi semestinya tidak difokuskan pada hal-hal yang terkait dengan ranah keberagaman beragama melainkan juga pada ranah sosial dan ekonomi.

"Kita juga perlu menyadari, kalau mengangkat masalah intoleran, apakah itu selalu terkait dengan persoalan nilai beragamanya seseorang? Bagaimana dengan beragam masalah perundungan atau bullying yang kerap terjadi pada siswa karena adanya intoleransi dalam nilai-nilai kehidupan keseharian?", tanya Ledia.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Komisi X DPR RI

"Kita juga perlu menyadari, kalau mengangkat masalah intoleran, apakah itu selalu terkait dengan persoalan nilai beragamanya seseorang? Bagaimana dengan beragam masalah perundungan atau bullying yang kerap terjadi pada siswa karena adanya intoleransi dalam nilai-nilai kehidupan keseharian?"

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Bikin Gaduh Nasional soal SKB Seragam, Aleg PKS: Masalah Lokal Terlalu Dibesarkan

KUTIPAN

Jakarta (08/02) --- Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih mendesak dicabutnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yang mengatur soal seragam sekolah karena telah memicu kegaduhan nasional.

"Sikap reaktif yang tidak perlu dan terkesan lebay, karena ini sebenarnya masalah lokal yang mudah diselesaikan oleh pemda sendiri, kenapa sampai harus dibuatkan SKB," kritiknya di Semarang, Senin (08/02).

Fikri khawatir, SKB 3 menteri tersebut malah akan memicu konflik antara pusat-daerah.

"SKB berpotensi merusak pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang sudah diatur dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah," kata politisi PKS ini.

Menurut Fikri, sektor pendidikan adalah salah satu kewenangan pemerintah yang konkuren, yakni urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

"Perguruan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat, SMA/K dan pendidikan khusus kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan tingkat SMP hingga ke bawah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota," urainya.

Sebelumnya, SKB yang terbit dengan Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 itu mengatur tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

SKB ini muncul sebagai respon atas kasus aturan seragam di SMKN 2 Kota Padang yang merupakan bagian beleid dalam intruksi walikota Padang sejak tahun 2005.

"Aturannya sudah lama, dan sudah menjadi bagian dari kearifan lokal warga Padang yang menjunjung tinggi budaya setempat," imbuh Fikri.

Generalisir kasus ini menjadi kegentingan nasional adalah bukti, bahwa pemerintah sedang krisis prioritas, kalau tidak mau dibilang kurang kerjaan.

"Faktanya, sudah ada Permendikbud No. 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam, kenapa ini tidak disosialisasikan ulang?," tanya Fikri.

Fikri menilai, alih-alih menjaga hak kebebasan memilih seragam bagi peserta didik, SKB ini justru menyimpang dari nilai-nilai Pancasila yang sudah disepakati pendiri bangsa.

"Melarang ketentuan yang diwajibkan oleh agama juga bertentangan dengan konstitusi," ujarnya.

Mendikbud, lanjut Fikri mestinya menginventarisir permasalahan pendidikan yang menggunung. Permasalahan guru masih belum selesai. Tuntutan ribuan guru dan tenaga kependidikan soal status, kesejahteraan, dan jaminan sosialnya masih terus menghiasi halaman berita. Situasi pandemi yang kian tidak terkendali berdampak 'learning loss' pada anak-anak kita. Dana BOS bagi sekolah yang kabarnya masih ramai disunat oknum pemda. Hingga soal ruang kelas yang rusak angkanya mencapai 1,3 juta ruang kelas menurut temuan DPR.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

"Mendikbud mestinya menginventarisir permasalahan pendidikan yang menggunung. Permasalahan guru masih belum selesai. Tuntutan ribuan guru dan tenaga kependidikan soal status, kesejahteraan, dan jaminan sosialnya masih terus menghiasi halaman berita"

Raker Dengan Menkeu, Anis Pertanyakan Tujuan Pemberian Insentif Pajak Untuk Mitra LPI

KUTIPAN

Jakarta (04/02) --- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan beberapa catatannya dalam Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan yang membahas tentang Konsultasi Mengenai Rencana Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI), Senin (01/02/2021) di Jakarta.

Politisi senior PKS ini menyampaikan bahwa insentif pajak merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh negara-negara berkembang untuk menarik investasi negaranya.

"Hal yang sama juga lakukan oleh Indonesia yang secara garis besar memiliki dua jenis insentif yang ditawarkan kepada investor. Kedua insentif tersebut adalah tax holiday yang diatur dalam PMK nomor 35 tahun 2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, dan tax allowance yang diatur dalam PP nomor 9 tahun 2016 tentang perubahan PP no 18 tahun 2015 tentang Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah Tertentu," papar Anis.

Anis menegaskan, walaupun Insentif Pajak bukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi investasi ke suatu negara, namun setidaknya mampu untuk meningkatkan 'portofolio' Indonesia dalam sektor pajak di mata investor.

"Sekarang, dengan adanya Lembaga Pengelola Investasi (LPI), Pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada pihak ketiga yang menjadi mitra investasi LPI. Harapannya perlakuan perpajakan ini akan menjadi daya tarik sejalan dengan pembentukan LPI sehingga harus didukung melalui perlakuan-perlakuan tertentu yang diberikan kepada Mitra LPI," ungkap Anis.

Anis mempertanyakan kebijakan pemerintah ini, jangan sampai perlakuan perpajakan ini hanya sebagai pemanis pelaku proyek.

"Saya mengingatkan bahwa PBB dalam handbook tentang Protecting The Text Best Of Developing Countries Second Edition menjelaskan bahwa pemerintah perlu tetap waspada terhadap potensi kehilangan penerimaan negara yang cukup besar," ujar Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini.

Anis menegaskan insentif pajak harus menjadi catatan penting bagi pemerintah mengingat penerimaan negara dari sektor perpajakan hingga saat ini belum memenuhi target.

Dalam pandangan Anis, pemerintah harus memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian dari adanya insentif pajak. Karena seringkali pemberian insentif pajak ini tidak efektif dan efisien. Juga rentan terhadap penyalahgunaan dan korupsi. Selain itu, efektivitas insentif pajak secara langsung berkaitan dengan iklim investasi suatu negara. Sehingga ketika terdapat dua negara yang memiliki insentif pajak yang hampir sama, maka secara substansial hal yang akan menarik Foreign Direct Investment (FDI) adalah siapa yang memiliki iklim investasi lebih baik.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

> “Pemerintah perlu memiliki kesiapan untuk memenangkan FDI. Dengan memperbaiki kondisi perekonomian, menyediakan infrastruktur yang memadai, memberikan kemudahan dalam perizinan usaha, mewujudkan kepastian hukum dan berbagai hal yang mendukung stabilitas ekonomi,”

Politisi PKS Soroti Standar Ganda Pemerintah Terhadap Transaksi Keuangan

KUTIPAN

Jakarta (05/02) --- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Junaidi Auly menyoroti sikap pemerintah yang standar ganda dalam penggunaan mata uang asing sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli selain rupiah.

Menurutnya, Pemerintah juga harus bersikap tegas pada penggunaan mata uang asing seperti dollar dan yuan di wilayah yang banyak turis mancanegara.

"Pemerintah jangan tebang pilih dalam menyikapi hal ini, masih banyak praktek transaksi pembayaran dengan valas yang masih dibiarkan," ujar Junaidi dalam keterangan tertulis. Jum'at, (05/02).

Seperti diberitakan, dalam sebuah video terekam aktivitas jual beli dengan menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar di pasar muamalah Depok, Jawa Barat. Kasus ini pun sedang dalam penyelidikan kepolisian.

Pria yang akrab disapa Bang Jun ini mengatakan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus mengedukasi dan mensosialisasikan kembali UU No.7/2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Indonesia.

"Sosialisasi dan edukasi rupiah sebagai kewajiban alat tukar harus terus dilakukan kepada masyarakat dan pelaku usaha khususnya di kawasan wisata dan wilayah yang berbatasan dengan negara lain," tegas Junaidi.

Selain itu, Legislator Fraksi PKS ini menuturkan bahwa dinar dan dirham identik dengan Islam dan ia sah menurut hukum sebagai alat investasi sebagaimana emas logam mulia, bahkan koin dinar dan dirham ada cetakan dari BUMN PT Aneka Tambang (Antam). Menurutnya, pemerintah perlu memfasilitasi gerakan dinar dan dirham sebagai kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia.

Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.
Anggota Komisi XI DPR RI

“Pemerintah juga harus bersikap tegas pada penggunaan mata uang asing seperti dollar dan yuan di wilayah yang banyak turis mancanegara. Pemerintah jangan tebang pilih dalam menyikapi hal ini, masih banyak praktek transaksi pembayaran dengan valas yang masih dibiarkan,:

PMN UNTUK 9 BUMN

FPKS menolak PMN Rp 20 triliun kepada JIWASRAYA melalui holding IFG BPUI.

- Fraksi PKS menilai skema pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) adalah skema financial engineering yang menyebabkan Rakyat dan Negara menanggung beban berat dari Skandal Jiwasraya.
- Skandal Jiwasraya merupakan korupsi dan kejahatan terorganisir (organized crime) yang dilakukan oleh sekelompok orang sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian besar.
- Pemberian PMN kepada BPUI jelas merupakan skema untuk menanggung beban Skandal Jiwasraya yang ingin dilakukan oleh Pemerintah dengan mengguna kan uang rakyat atau APBN.
- Sangat tidak adil memberikan PMN dari uang keringat rakyat kepada perusahaan yang terindikasi dirampok oleh sekelompok orang secara terstruktur.
- PMN seharusnya menjadi pendorong untuk memperbaiki kinerja dan daya saing BUMN sehingga berdampak besar bagi kemakmuran rakyat.

| Grafis : Aditya Angga
| Olah Data : Tim Riset FPKS DPR RI

Aleg PKS: Sexual Consent Bertentangan dengan Norma Agama, Kultur, dan Hukum di Indonesia

KUTIPAN

Jakarta (5/02) --- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf memberikan pandangan tentang bahaya penyusupan sexual consent (kesepakatan seksual) pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Menurutnya, nomenklatur 'kekerasan seksual' tidak tepat, untuk itu Muzzammil cenderung menggunakan peristilahan 'kejahatan seksual' atau 'kejahatan terhadap kesusilaan' sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan buku ke-2 bab 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Kita semua sepakat untuk bagaimana meminimalisir kejahatan seksual atau kejahatan terhadap kesusilaan ini, tetapi pada saat yang sama kita tidak membuka persoalan yang juga dahsyat," ujarnya melalui akun pribadi Twitter-nya sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI dengan INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), The Bodyshop, dan Komnas Perempuan terkait RUU PKS, Selasa (2/02).

Ketua DPP PKS Bidang Polhukam itu membeberkan penjelasan sexual violence (kekerasan seksual) dalam paradigma Barat yang terkait erat dengan sexual consent.

"Yang saya maksud adalah sexual violence dalam paradigma Barat adalah merupakan peristiwa yang terjadi ketika sexual consent tidak dilakukan. Definisi kekerasan seksual dalam terminologi Barat mitranya adalah sexual consent, dan bagi mereka penganutnya beranggapan seks itu legal baik menikah ataupun tidak menikah, dan bahkan seks sesama jenis pun dibenarkan sejauh disepakati bersama," jelas Muzzammil.

Legislator asal Dapil Lampung I tersebut mengungkapkan upaya perluasan definisi perzinahan melalui RUU KUHP di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) di tahun 2011 dan 2015 yang urung disahkan akibat adanya desakan penolakan.

"Judicial Review MK (Mahkamah Konstitusi) yang diputuskan pada bulan Desember 2017 AILA (Aliansi Cinta Keluarga Indonesia), dari 9 hakim MK, 4 orang menyetujui apa yang diusulkan AILA, salah satunya adalah perluasan definisi perzinahan yang ada di KUHP. Putusan MK telah menegaskan bahwa perzinahan adalah semua hubungan seks diluar tali pernikahan, dan 5 hakim tidak menolak tentang hal tersebut akan tetapi mengatakan pengaturan itu adalah open legal policy," ucap Muzzammil.

Doktor Ilmu Komunikasi Politik itu menegaskan bahwa pemahaman sexual consent bertentangan dengan norma agama, kultur, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Ia juga menyatakan sikap Fraksi PKS DPR RI menolak konsep sexual consent masuk dalam konsep kekerasan seksual.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si.
Anggota Badan Legislasi DPR RI

"Pemahaman sexual consent di Barat sudah sangat meluas, seks sesama jenis adalah hal yang wajar di sana, tapi tidak di negara kita Indonesia. Sexual consent bertentangan dengan norma agama kita, bertentangan dengan kultur kita, bertentangan dengan UUD kita Pasal 28B dan UU Pernikahan kita.

Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan
Fraksi PKS DPR RI
fraksipksdprri
@fpksdprri
fraksi.pks.id

Jazuli Juwaini Minta Pesantren Jadi Benteng Terakhir Bangun Akhlak Bangsa

KUTIPAN

Jazuli mengatakan, pihaknya terus berkomitmen untuk memajukan Pondok Pesantren. “Makanya saya berharap Pondok Pesantren menjadi benteng terakhir dalam membangun moral dan akhlak bangsa dan negara, Sebagai komitmen untuk kemajuan pondok pesantren, pada tahun 2018 DPR RI telah mengesahkan UU tentang pondok Pesanten.

SERANG – Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kabupaten Serang menyelenggarakan rapat kerja daerah (Rakerda) kelima, di Kabupaten Serang, Sabtu (6/2/2021). Acara tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini.

Dalam kesempatan tersebut Jazuli mengatakan, pihaknya terus berkomitmen untuk memajukan Pondok Pesantren.

“Makanya saya berharap Pondok Pesantren menjadi benteng terakhir dalam membangun moral dan akhlak bangsa dan negara,” katanya dalam keterangan tertulis.

Sebagai komitmen untuk kemajuan pondok pesantren, kaya Jazuli, pada tahun 2018 DPR RI telah mengesahkan UU tentang pondok Pesanten.

Setelah lahirnya UU tersebut negara memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan untuk Pondok Pesantren. Menurutnya, Pesantren merupakan soko guru pendidikan yang lahir dari rahim ulama.

“Karena itu, saya menjadi salah satu anggota yang berjuang keras untuk ulama dan pondok pesantren di Indonesia,” sebutnya.

Menurut ketua Fraksi PKS dari daerah pemilihan Banten yang juga jebolan pesantren ini menyebut, pada dasarnya setiap pondok pesantren memiliki karakteristik pendidikan pesantren sendiri.

Untuk itu, keunikan, kekhasan, dan kekhususan karakter dan kurikulum pesantren yang ada dan beragam menjadi kekayaan bangsa.

“Karena sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan dukungan optimal baik dari sisi kebijakan, pembinaan, sarana prasarana, dan anggaran,” katanya.

Sementara perwakilan Presidium FSPP Kabupaten Serang, Kiyai Fathurrahman mengucapkan terimakasih atas dukungan selama ini kepada FSPP.

“Saya berharap kedepan semakin banyak pejabat negara yang memiliki komitmen untuk membangun peradaban Indonesia,” katanya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Baznas Kabupaten Serang, Perwakilan Kemenag Kabupaten Serang dan Perwakilan Unsur Pemerintah Kabupaten Serang.

(*/Faqih)

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten II

“Pada dasarnya setiap pondok pesantren memiliki karakteristik pendidikan pesantren sendiri Untuk itu, keunikan, kekhasan, dan kekhususan karakter dan kurikulum pesantren yang ada dan beragam menjadi kekayaan bangsa. Karena sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan dukungan optimal baik dari sisi kebijakan, pembinaan, sarana prasarana, dan anggaran”

Bersama Rombongan Komisi III DPR, Habib Aboe Serahkan Bantuan bagi Korban Banjir Kalsel

KUTIPAN

Banjarmasin (04/02) --- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Al-Habsy, bersama Anggota Komisi III lainnya, hari ini melakukan Kunjungan Spesifik ke Kalimantan Selatan.

Kunjungan spesifik adalah kunjungan kerja dari DPR untuk meninjau sebuah persoalan tertentu di lapangan. Kali ini Komisi III melakukan kunjungan spesifik dengan peninjauan Banjir di sekitar wilayah sungai tabuk.

Menurut pantauan pria yang akrab disapa Habib Aboe, saat ini wilayah tersebut masih terdapat genangan yang cukup tinggi sehingga tim Komisi III masih harus menggunakan perahu karet.

"Saya sangat prihatin dengan kondisi seperti ini, sebagai wakil dari Kalsel saya mengajak rekan rekan komisi III untuk melihat langsung ke lapangan," ujar Sekjen DPP PKS ini.

Hal ini, imbuhnya, dilakukan agar rekan rekan melihat langsung kondisi lapangan sehingga nanti ada perhatian khusus untuk Kalsel, baik pada penanganan banjirnya maupun untuk recovery paska banjir.

"Pada kesempatan ini, rekan rekan Komisi III menyampaikan bantuan dua ribu paket sembako untuk para korban banjir di Martapura, Barabai dan Batola. Saat ini mereka masih membutuhkan dukungan bahan pokok untuk kehidupan sehari-hari. Tentunya perlu ada perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun daerah mengenai hal ini," terang Habib Aboe.

Kunjungan Komisi III didampingi langsung oleh Kapolda Irjen. Pol. Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum, Kajati Kalsel Rudi Prabowo Aji dan Dandim 1006 Martapura Letkol Arm Siswo Budiarto. Hadir pula Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang juga ikut mendampingi kegiatan Komisi III tersebut.

"Saya minta Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah terus memberikan program dukungan baik logistik maupun kesehatan untuk menolong warga kalsel yang tertimpa musibah. Secara khusus saya minta Kapolda Kalsel agar menerjunkan personelnya guna membantu penanganan banjir ini. Karena Polri adalah mitra kerja Komisi III yang memiliki personel terbesar dan memiliki visi melayani dan mengayomi masyarakat," tutup Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ini.

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I

> "Saya minta Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah terus memberikan program dukungan baik logistik maupun kesehatan untuk menolong warga kalsel yang tertimpa musibah. Secara khusus saya minta Kapolda Kalsel agar menerjunkan personelnya guna membantu penanganan banjir ini"

Bersama Gubernur dan Cagub Terpilih Sumbar, Nevi Hadiri Peresmian Kantor DPD PKS Kabupaten Pasaman

KUTIPAN

Pasaman (08/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina

menghadiri peresmian kantor DPD PKS Kabupaten Pasaman.

Peresmian kantor DPD PKS Pasaman ini juga turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Bapak Irwan Prayitno, dan juga Gubernur terpilih pada pilkada 9 Desember 2019 lalu, Mahyeldi Ansharullah.

"Saya sangat bangga terhadap pencapaian DPD PKS Kabupaten Pasaman yang telah memiliki kantor sendiri, tanpa harus menyewa lagi. Kantor milik sendiri merupakan sebuah kebanggaan semua anggota partai dan pengurus struktur mulai dari tingkat daerah, cabang hingga ranting", tutur Nevi.

Politisi PKS ini melihat antusias anggota partai dan berbagai undangan tokoh masyarakat se kabupaten pasaman yang selama ini mendukung terus upaya PKS memperjuangkan hak-hak rakyat.

"Saya berharap kantor DPD ini dapat meningkatkan kinerja dan kerja PKS di kabupaten pasaman. Selain itu, tempat ini sebagai rumah rakyat pasaman, sehingga dapat sebagai wadah silaturahmi kader dan masyarakat. Karena Rumah Rakyat, maka tempat ini sangat terbuka sebagai rumah aspirasi untuk menyampaikan segala pendapat yang ada di masyarakat yang kemudian dapat di teruskan kepada dewan PKS di berbagai jenjang baik di tingkat kabupaten, propinsi maupun pusat", kata Nevi dalam sambutannya.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menjelaskan, bahwa Kabupaten Pasaman merupakan daerah yang sangat potensial dalam sumber daya manusianya. Kabupaten Pasaman memiliki luas wilayah 3.947,63 km^2 dan berpenduduk sebanyak 253.299 jiwa menurut sensus penduduk tahun 2010. Pahlawan Nasional Tuanku Imam Bonjol berasal dari kabupaten ini. Nevi berharap, muncul pahlawan-pahlawan lain yang berasal dari pasaman di berbagai bidang seperti pendidikan, pertanian, ekonomi hingga budaya.

Nevi melanjutkan, Pasaman merupakan daerah dengan sumber daya alam yang sangat besar. Selain Sawit, Nilam Pasaman mampu menembus pasar dunia karena kualitasnya.

"Mari kita majukan Kabupaten Pasaman ini baik kualitas ekonomi, pendidikan maupun kesehatannya. Kantor Baru DPD PKS Pasaman ini adalah awal mulanya, dalam hal karya dan kreatifitas seluruh anggota Partai. Melayani dan berkarya adalah tindakan nyata yang akan di tunggu-tunggu masyarakat kabupaten Pasaman", tutup Nevi Zuairina.

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

> “Saya sangat bangga terhadap pencapaian DPD PKS Kabupaten Pasaman yang telah memiliki kantor sendiri, tanpa harus menyewa lagi. Kantor milik sendiri merupakan sebuah kebanggaan semua anggota partai dan pengurus struktur mulai dari tingkat daerah, cabang hingga ranting

Kunjungi Korban Banjir Kota Semarang, Bukhori Salurkan Bantuan Dana dan Logistik

KUTIPAN

Semarang (09/02) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, meninjau langsung lokasi terdampak bencana di Kota Semarang, Minggu-Senin (7-8/2).

Kunjungan Bukhori tersebut, dalam rangka penyaluran bantuan sekaligus memantau kesiapan daerah menghadapi bencana.

Di hari pertama Bukhori bersama Mensos Risma memantau secara langsung kegiatan warga gudang logistik sekaligus dapur umum di Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan.

Selain melakukan peninjauan, Bukhori turut menyerap aspirasi para relawan tagana dan masyarakat yang mengungsi di masjid setempat.

"Para relawan ini bekerja tanpa dibayar. Padahal jam kerja mereka hampir setiap saat dan nyawa mereka senantiasa terancam. Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan mereka," ungkapnya.

Di hari selanjutnya, didampingi BNPB, BPBD tingkat provinsi dan kota, Bukhori meninjau kawasan terdampak angin puting beliung di Kelurahan Muktiharjo. Sejumlah rumah warga mengalami kerusakan dari tingkat ringan hingga berat.

"Kerusakan juga menimpa balai warga yang digunakan sebagai tempat pengungsian. Saya meminta pemerintah bisa segera meninjau langsung, memetakan, sekaligus memberikan bantuan pada warga," imbuhnya.

Lebih lanjut, Bukhori beserta para relawan juga telah membentuk dapur umum di 20 titik yang tersebar di 4 Kecamatan antara lain, Kecamatan Genuk, Gayamsari, Semarang Timur, dan Pedurungan. Ia juga mengirimkan bantuan sebanyak 10 truk tanki air bersih dan sejumlah dana untuk operasional dapur umum demi meringankan beban korban banjir.

"Keberadaan dapur umum ini terbukti sangat membantu korban terdampak. Karena itu, mohon BPBD Kota bisa mencatat dapur umum ini supaya bisa mengakses suplai bantuan sekaligus diberdayakan untuk distribusi logistik," ujarnya.

Politisi PKS ini juga meninjau langsung korban longsor di Kelurahan Bongsari yang mengakibatkan 2 rumah dan 2 kendaraan bermotor rusak berat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini.

"Dinas Pekerjaan Umum (PU) perlu segera mengadvokasi hal ini demi keselamatan nyawa warga. Di sisi lain, korban longsor harus diberikan bantuan mengingat musibah ini turut menghilangkan mata pencaharian mereka," tegasnya.

Anggota Baleg ini turut menyoroti keberadaan relawan selama bencana, salah satunya Relawan Indonesia (Relindo). Setiap harinya, kurang lebih sebanyak 15 relawan mereka bersiaga dengan tugas bergilir.

"Mereka sangat responsif. Sebelum pemerintah datang sudah hadir membantu masyarakat," ujarnya.

Sebab itu, demikian Bukhori melanjutkan, BPBD perlu menggandeng mereka dalam penanggulangan bencana supaya tidak perlu lagi mengadakan rekrutmen yang memboroskan anggaran.

"Dalam rangka menunjang kinerja mereka di lapangan agar lebih optimal, BPBD juga perlu memberikan sejumlah bantuan logistik seperti perahu karet, obat-obatan, dan vitamin," ungkapnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

KH. BUKHORI, Lc., M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

"Keberadaan dapur umum ini terbukti sangat membantu korban terdampak. Karena itu, mohon BPBD Kota bisa mencatat dapur umum ini supaya bisa mengakses suplai bantuan sekaligus diberdayakan untuk distribusi logistik,"

PKS

BIO GRAFIS

Yuk Kenali Aleg Kamu

SURAHMAN HIDAYAT

Profil

- Nama Lengkap
  Dr. K.H. Surahman Hidayat, M.A.
- Tempat, Tanggal Lahir
  Ciamis, 13 Mei 1957
- Dapil
  Jawa Barat X (Kab. Ciamis, Pangandaran, Kuningan, Kota Banjar)

Pendidikan

- **MA PUI Cijantung Ciamis** Jawa Barat, 1973
- **S1 Syari'ah Universitas Al Azhar,** Cairo, 1989
- **S2 Syari'ah Universitas Al Azhar,** Cairo, 1991
- **S3 Syari'ah Universitas Al Azhar,** Cairo, 2001

Keluarga

- Istri : **Dra. Hj. Cucu Nining**
- Anak : **2 Laki-Laki, 2 Perempuan**

Riwayat Organisasi

- **Dewan Kerja Cabang Pramuka**
- **Menwa**
- **HMI**
- **HPMI,** Mesir
- **Poskolap Tim Penanggulangan Krisis Mahasiswa Indonesia,** Mesir
- **Badan Wakaf Mahasiswa Indonesia,** Mesir
- **Ikatan Dai Indonesia (IKADI)**
- **Pusat Konsultasi Syariah**
- **Syariah Economics dan Banking Institute**
- **Institut Manajemen Zakat**

Media Sosial

- : KH. DR. Surahman Hidayat, MA
- : @kh.dr.surahmanhidayat.ma
- : @ KH. Dr. Surahman Hidayat, MA.

Riwayat Pekerjaan

- **Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Jakarta**
- **Direktur Pusat Konsultan Syari'ah Jakarta**
- **Dewan Pengawas Syari'ah di Bank Syari'ah DKI**
- **Dosen Program Pasca Sarjana UMY Jakarta**
- **Dewan Pengawas Syariah di Bumida Syari'ah**
- **Dewan Pembina PKPU**
- **Pengasuh Majelis Yas-alunaka Islam Solusi Kehidupan**
- **Pengasuh Ponpes Tahfizh SMA Tarbawi Zaid bin Tsabit**
- **Anggota DPR RI,** 2009-2014
- **Anggota DPR RI,** 2014-2019
- **Anggota DPR RI,** 2019-2024

Anggota FPKS Salurkan Bantuan bagi Korban Pergerakan Tanah di Sukabumi

KUTIPAN

Selain menyalurkan sejumlah bantuan berupa sembako dan kebutuhan balita, legislator asal Sukabumi ini juga meninjau beberapa titik yang terdampak bencana pergerakan tanah tersebut.

Sukabumi (07/02) --- Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet, menyalurkan sejumlah bantuan kepada warga yang terdampak bencana pergerakan tanah di Kampung Ciherang, Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi.

"Semoga warga yang menjadi korban bencana ini diberikan kesabaran," kata Slamet kepada awak media, Minggu (7/2/2021) di lokasi bencana.

Selain menyalurkan sejumlah bantuan berupa sembako dan kebutuhan balita, legislator asal Sukabumi ini juga meninjau beberapa titik yang terdampak bencana pergerakan tanah tersebut.

"Kami juga terus mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar terus melakukan penanganan terhadap para korban," ucapnya.

"Semoga segera ada solusi terbaik bagi bencana tersebut dan warga harus terus berhati-hati," pungkasnya menambahkan.

drh. H. SLAMET
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IV

Kami juga terus mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar terus melakukan penanganan terhadap para korban Semoga segera ada solusi terbaik bagi bencana tersebut dan warga harus terus berhati-hati

Ratusan Warga Jadi Korban Gas Beracun Di Dapil, Aleg PKS Minta Aparat Usut Tuntas

KUTIPAN

Jakarta (04/02) --- Anggota DPR RI asal Sumatera Utara dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, menyoroti musibah yang menimpa warga di Daerah Pemilihannya Desa Sibanggor julu, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

Lima warga meninggal dunia, dua diantaranya masih balita dan puluhan warga dirawat di rumah sakit serta lebih dari 200 orang harus mengungsi akibat menghirup gas beracun.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini pun turut prihatin atas musibah yang menimpa warga desa sibanggor julu kabupaten mandailing natal.

"Kami turut Prihatin atas kejadian bocornya gas beracun di Desa Sibanggor Julu. Kami mohon dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersama-sama dapat mengatasi musibah yang menyedihkan ini dan berdoa untuk kesembuhan bagi para korban yang masih menjalani perawatan," ungkap Iskan.

Iskan menambahkan jatuhnya korban terhadap masyarakat di sekitar lokasi proyek, mengindikasikan bahwa kegiatan uji sumur uap panas (Geothermal) tersebut belum disosialisasikan dengan baik.

"Faktanya dilapangan itu kan rencana pembukaan juga sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2021, disosialisasikan melalui kepala desa, dan himbauan dari Masjid, tapi pada akhirnya pelaksanaan itu diundur satu hari menjadi tanggal 25 Januari 2021. Disini saya anggap sosialisasi kepada masyarakat yang menjadi kurang maksimal." ujar Iskan.

Tahapan sosialisasi kepada masyarakat, lanjut Iskan, mulai dari SOP dan potensi bahaya termasuk potensi gas beracun yang akan bocor ini apakah sudah disampaikan secara jelas juga kepada masyarakat sekitar ?

"Kalau itu tak dilakukan dengan baik maka jelas berdampak fatal jatuhnya korban yang merupakan petani di sekitar proyek," tegas Iskan.

Legislator Dapil Sumut II ini juga menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan proyek wajib dilakukan oleh pengelola proyek tersebut dalam hal meminimalisir dampak buruk yang akan terjadi.

"Sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan proyek panas bumi adalah wajib dilakukan oleh pengelola proyek. pelibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi tentunya mampu mengantisipasi dampak terhadap masyarakat sekitar, maka kedepan sudah seharusnya setiap perusahaan itu berbenah," terangnya.

Bagaimanapun itu, lanjut Iskan, peristiwa jatuhnya korban jiwa atas kegiatan uji geothermal oleh PT SMGP harus diusut tuntas dan wajib diproses secara hukum.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Anggota Komisi VIII DPR RI

> “Sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan proyek panas bumi adalah wajib dilakukan oleh pengelola proyek. pelibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi tentunya mampu mengantisipasi dampak terhadap masyarakat sekitar, maka kedepan sudah seharusnya setiap perusahaan itu berbenah”

Aleg PKS Ajak Tokoh Masyarakat Kota Tasikmalaya Menjaga Keutuhan NKRI

KUTIPAN

Tasikmalaya (07/02) --- Warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Demikian ajakan Toriq Hidayat kepada Tokoh Masyarakat yang ada di kota Tasikmalaya.

"Potensi disintegrasi terhadap NKRI kapan saja bisa terjadi, manakala sebagian besar warga Indonesia tidak mengetahui hakikat, sejarah dan landasan hukum NKRI", ungkap Anggota Komisi I DPR RI dari PKS ini.

Hal ini diungkapkan oleh politisi PKS kepada seluruh Tokoh Masyarakat yang terdiri dari para Ketua RW dan Ketua RT se-Kota Tasikmalaya pada kegiatan Sosialisai 4 pilar yang digelar di Rumah Makan Baraya Sunda, kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. (6/2/2021)

Itu sebabnya menurut Toriq, kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat ini menjadi sangat penting melihat kondisi objektif sebagian warga yang memiliki masalah pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai 4 pilar. Kuatnya fanatisme kedaerahan, dan kurangnya keteladanan sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh mulai tingkat RT/RW sampai Pejabat Publik ditingkat pusat.

"Kondisi ini diperparah dengan bencana alam dan pandemi, bencana moral di semua segmen terutama di kalangan pejabat seperti Korupsi, Ketidakadilan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, dan keberpihakan kepada golongan masyarakat tertentu", imbuhnya.

Toriq tegaskan, untuk memperbaiki itu semua maka harus dimulai dari memberikan pemahaman kepada semua lapisan masyarakat tentang cara pandang geopolitik, bahwa kelangsungan hidup suatu bangsa tergantung kepada ruang untuk hidupnya atau wilayah negara.

"Demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, maka wilayah negara Republik Indonesia harus dipertahankan. Semua Warga Negara Indonesia (WNI) berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara sekaligus pertahanan dan keamanan negara", tutup Toriq.

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

"Kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat ini menjadi sangat penting melihat kondisi objektif sebagian warga yang memiliki masalah pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai 4 pilar. Kuatnya fanatisme kedaerahan, dan kurangnya keteladanan sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh mulai tingkat RT/RW sampai Pejabat Publik ditingkat pusat.

Kundapil Depok, Nur Azizah Berbagi Sembako pada Pengemudi Opang dan Satpam

KUTIPAN

Depok (09/02) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, berbagi paket sembako kepada Petugas Satpam dan pengemudi Ojeg pangkalan (Opang)

Bertempat di di Komplek Griya Tugu Asri (GTA), Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, pada Sabtu (06/02/2021).

Ditemani putera pertamanya Ahmad Syihan Isma'il yang juga merupakan Sekertaris DPRa PKS Kelurahan Tugu, Nur Azizah berbagi paket yang menurutnya ini tidak semata hanya berbagi materi, tapi merupakan bentuk tali kasih sebagai sesama warga yang sama-sama berjuang melayani masyarakat.

Menurut Nur Azizah, di masa pendemi Covid-19 ini, banyak kelompok masyarakat yang terdampak, para pengemudi ojeg pangkalan (Opang) ini merupakan salah satu kelompok yang terdampak Pandemi Covid-19.

Melalui bantuan yang diberikan, Nur Azizah berharap dapat sedikit meringankan beban mereka.

Selain itu, bantuan juga diberikan kepada Petugas Satpam, sebagai bentuk apresiasi karena telah berjuang menjaga ketertiban dan keamanan warga, khususnya warga Komplek GTA.

Nur Azizah yang merupakan Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini, ia menyerahkan paket sembako untuk semua petugas satpam dan semua pengemudi Ojek Pangkalan GTA.

Haris, salah petugas satpam, menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian Nur Azizah kepadanya dan teman-temannya.

Haris yang sudah bertugas menjadi Satuan Petugas Keamanan di Komplek GTA selama 23 Tahun ini mengaku, Nur Azizah dan keluarga merupakan warga yang sangat kooperatif, perhatian, dan peduli kepada lingkungan sekitarnya.

Ia mengaku sudah lama mengenal baik Nur Azizah dan Suaminya Nur Mahmudi Isma'il yang merupakan Walikota Depok periode 2006-2016.

"Saya sudah 23 tahun menjadi satpam di GTA dan sudah lama mengenal baik keluarga Pak Nur dan Ibu Nur Azizah, dari sebelum pak Nur menjabat sebagai walikota depok", ungkap Haris.

"Saya sangat mengapresiasi ibu Nur yang tidak pernah segan untuk terjun langsung menemui masyarakat kecil, memberikan perhatian khusus, seperti yang dilakukan saat ini. Sebagai warga masyarakat ibu Nur dan bapak Nur sangat dekat dengan kami", imbuhnya.

Menurut Haris, di Depok memang perlu ada sosok seorang wakil rakyat yang benar-benar merakyat dan mampu memahami kondisi rakyat. Tidak lantas setelah terpilih menjadi anggota dewan, lalu melupakan kami.

"Saya lihat ibu tidak pernah ada yang berubah, dari sebelum jadi wakil rakyat sampai sekarang jadi pejabat pun, perhatiannya sama, tidak pernah berubah. Harapannya, semoga ibu selalu sehat dan semakin sukses", jelas Haris.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

> di masa pendemi Covid-19 ini, banyak kelompok masyarakat yang terdampak, para pengemudi ojeg pangkalan (Opang) ini merupakan salah satu kelompok yang terdampak Pandemi Covid-19.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kunjungi Dapil, Hermanto Ajak Milenial Padang Kelola Bisnis Pertanian Perkotaan

KUTIPAN

Padang (07/02) --- Anggota DPR RI Dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan berkesempatan berbicara dihadapan kaum milenial yang hadir mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Bagi Petani dan Penyuluh di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat di Padang akhir pekan ini.

Hermanto mengajak milenial Padang agar tidak ragu untuk kembali menekuni sektor pertanian.

"Sektor pertanian bila ditekuni dengan serius bisa mendatangkan penghasilan yang tidak kalah dengan sektor lain. Ada milenial yang menekuni bisnis pertanian, penghasilannya ratusan juta sebulan," ujar Hermanto.

Lebih jauh Hermanto mengungkapkan, saat ini Indonesia sedang mengalami bonus Demografi dimana penduduk usia produktif jauh lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif.

"Kondisi ini harus dikelola sebaik-baiknya. Jangan sampai kita kehilangan momentum yang sangat baik ini," ujar legislator dari FPKS ini.

Penduduk usia produktif tersebut mesti tersebar menekuni semua sektor kehidupan termasuk sektor pertanian.

"Di masa pandemi Covid-19 ini, sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif sementara sektor lain mengalami pertumbuhan negatif. Saat ini, sektor pertanian menunjukkan keunggulan dibandingkan sektor lain," tutur Hermanto.

Hadir memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Gubernur meminta agar pemilik tanah di kota Padang tidak membiarkan tanahnya menganggur. Kalau masih belum mau dipakai agar dipinjamkan kepada mereka yang siap menggarapnya.

"Setelah kegiatan ini para milenial Padang mestinya diberi pinjaman tanah garapan untuk dikelola dengan konsep pertanian perkotaan," ucapnya.

Disamping Hermanto dan Irwan Prayitno, hadir juga sebagai pembicara: Joni Jafri dari Balai Pelatihan Pertanian Jambi, Zulhaq Ramadhan (pemilik Serua Farm dan Hidroponikita, Jakarta) dan Anggota DPRD Kota Padang Pun Ardi.

Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

“Saat ini Indonesia sedang mengalami bonus Demografi dimana penduduk usia produktif jauh lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif. Kondisi ini harus dikelola sebaik-baiknya. Jangan sampai kita kehilangan momentum yang sangat baik ini,"

You Stay At Home,
We Stay At Parliament
DPR - RI
PKS

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Terima Aspirasi MKLI, Fraksi PKS: Kawal Terus Kinerja PLN

KUTIPAN

Jakarta (10/02) --- Fraksi PKS DPR RI Komisi VII menerima aspirasi terkait penyimpangan teknis dan strategis tentang pengelolaan listrik di Indonesia.

Dalam aspirasi tersebut, perwakilan Masyarakat Konsumen Listrik Indonesia (MKLI) mengadukan beberapa hal diantaranya mengenai listrik di Jawa dan Bali yang di swastakan, pelanggaran keputusan MK, serta subsidi dengan sistem TOP (take or pay).

Menanggapi aduan tersebut, anggota Komisi VII FPKS DPR RI Rofik Hananto menyatakan bahwa masalah kelistrikan di Indonesia masih menjadi salah satu hal yang harus dikhawatirkan.

"Masalah kelistrikan ini khususnya kebijakan Multi Buyer and Multi Seller system (MBMS) ini memang menjadi salah satu yang kami khawatirkan, apalagi keputusan-keputusan yang sudah di batalkan MK kembali muncul di Undang-Undang." Jawab Rofik dalam Hari Aspirasi, Selasa (9/2/2021).

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto juga turut menyinggung Keputusan MK khususnya Pasal 10 Ayat 2 dan Pasal 11 Ayat 1 UU Ketenagalistrikan. Menurutnya, terdapat dua klausa yang patut diperhatikan yaitu prinsip unbundling dan prinsip kekuasaan oleh negara.

"Pertanyaannya adalah apakah praktek kelistrikan yang sekarang ini bertentangan dengan prinsip unbundling dan prinsip yang dikuasai negara. Selama negara melakukan regulasi pengaturan, maka negara masih dominan menguasai. Di sisi unbundling, kami melihat selama swasta ini hanya suplemen ketika kita tidak mampu, maka itu masih dimungkinkan. Tapi ketika dia jadi dominan itu yang berbahaya. Jadi kita harus kaji dengan cermat lagi mengenai keputusan MK, makna dikuasai negara, dan bertentangan dengan UU secara bersyarat dengan dua syarat tadi." Tegas Mulyanto.

Mulyanto juga mengatakan akan terus mengawasi renegosiasi terkait sistem TOP yang terbilang tidak sehat ini, melihat demand listrik di tengah pandemi Covid-19 terus menurun sehingga menyebabkan PLN mengalami kerugian.

"Dirut PLN menyampaikan bahwa mereka tengah melakukan negoisasi terkait TOP, dan masalah 35.000 MW dan 75.000 MW itu sedang di reschedule agar disesuaikan dengan demand listrik yang ada. Saya rasa itu sudah bagus dan akan kita kejar terus masalah TOP ini." Jelas Mulyanto.

Mulyanto menegaskan bahwa pengawalan akan terus dilakukan demi pengelolaan PLN yang lebih baik.

"Kami berjuang pada garis yang sama. Kita selalu berada membela mesyarakat terutama masyarakat kecil agar mereka bisa hidup sejahtera dan agar negara dalam hal ini juga kuat mengelola PLN dengan sangat baik. Jangan sampai banyak utang seperti sekarang." Tutup Mulyanto.

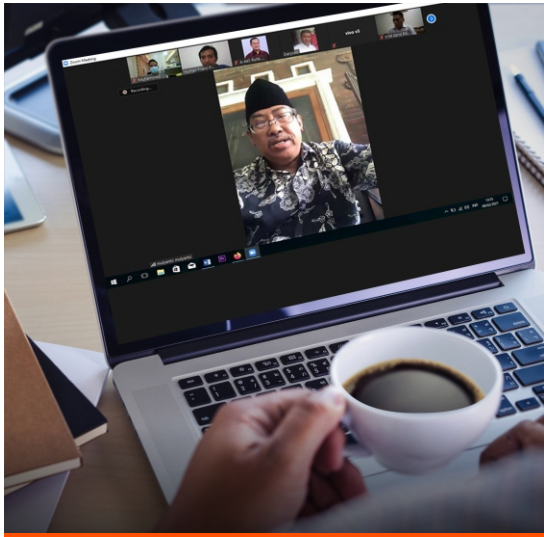

Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

"Dirut PLN menyampaikan bahwa mereka tengah melakukan negoisasi terkait TOP, dan masalah 35.000 MW dan 75.000 MW itu sedang di reschedule agar disesuaikan dengan demand listrik yang ada. Saya rasa itu sudah bagus dan akan kita kejar terus masalah TOP ini."

Terkait Penahanan Eks-Pimpinan FPI,

HNW: Aparat Hukum Harus Transparan dan Adil, Tangani Kasus Tokoh Agama

KUTIPAN

Jakarta (09/02) --- Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Majelis MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan aparat penegak hukum, baik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun Kejaksaan,

untuk benar-benar transparan, adil dan profesional dalam menangani sejumlah kasus yang melibatkan tokoh Agama.

Menurut pria yang akrab disapa HNW ini, profesional dan adil serta transparan diperlukan karena sensitifitasnya, juga posisi terhormat tokoh Agama dikalangan Umat, seperti dalam kasus penetapan tersangka dan penahanan terhadap Habib Rizieq Syihab, mantan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) KH Shobri Lubis dan petinggi-petinggi FPI lainnya.

"Sikap transparan, adil dan profesional ini perlu dihadirkan, untuk kebenaran penegakan hukum, dan untuk mengembalikan kepercayaan Umat dan Publik terhadap penegakan hukum yg adil dan benar. Apalagi terhadap tokoh Agama. Juga agar tidak menimbulkan fitnah dan salah paham di masyarakat, terkait aparat hukum dan hubungan-nya dengan para tokoh Agama. Dan juga sangat penting memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk tokoh-tokoh Agama, tanpa kecuali, sebagaimana janji Kapolri yang baru," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu(10/02).

Selain itu, HNW menuturkan, bahwa aparat penegak hukum harusnya juga bisa memastikan kesehatan, keselamatan dan memberikan akses pelayanan kesehatan bagi para tokoh Agama yang ditahan tersebut. Apalagi, publik juga mengetahui adanya bebe-rapa pihak yang ditahan di ru-mah tahanan Bareskrim terpapar Covid-19, sekalipun sekarang telah sembuh. Dan, publik juga menaruh perhatian pada kasus yang terbaru, wa-fatnya Ustadz Maaher at Thuwa-ilibi yang malah meninggal dalam status ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri.

"Aparat harus bisa menjaga dan memastikan kesehatan dan keselamatan para tokoh Agama yang ditahan tersebut. Jangan sampai mere-ka terpapar penyakit seperti covid-19 justru ketika mereka di dalam rutan yang berada di bawah pengawasan aparat terkait. Apalagi kalau sampai ada yang meninggal di dalam tahanan seperti kasusnya ustadz Maher," tuturnya.

HNW mengatakan bahwa sikap transparan, adil dan profesional perlu dihadirkan, juga dalam menangani kasus yang menjerat tokoh Agama. Aparat hukum perlu merealisasikan visi dan janji Kapolri Jendeal Listyo Sigit yang akan memimpin Polri dengan konsep 'Presisi', yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

"Konsep ini seharusnya tidak hanya dimiliki oleh setiap penyidik Polri, tetapi juga kejaksaan yang saat ini menangani kasus setelah pelimpahan berkas dari kepolisian," ujarnya.

Selain itu, lanjut HNW, sikap positif dari Kapolri Listyo Sigit dalam upayanya bersilatu-rahim dan minta dukungan kepada para tokoh Agama Islam seperti ke Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Robithoh Alawiyah, dipujikan dan penting dilanjutkan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Wakil Ketua MPR RI

"Aparat harus bisa menjaga dan memastikan kesehatan dan keselamatan para tokoh Agama yang ditahan tersebut. Jangan sampai mereka terpapar penyakit seperti covid-19 justru ketika mereka di dalam rutan yang berada di bawah pengawasan aparat terkait.

Kunjungi Kanal Resmi Fraksi PKS DPR RI

- Website fraksi.pks.id
- Instagram fraksipksdprri
- Twitter @fraksipksdprri
- Facebook Fraksi PKS DPR RI
- Youtube PKSTV DPR RI

Nantikan Setiap Pekan